



2023 LAPORAN KEUANGAN UAPPA-E1 (Audited)

**BADAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEUANGAN**

 WWW.BPPK.KEMENKEU.GO.ID

 JALAN PURNAWARMAN 99,
JAKARTA

**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI**

Laporan Keuangan
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2023
(Audited)



Jalan Purnawarman Nomor 99 Kebayoran Baru
Jakarta



Kata Pengantar

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) sebagai salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Neraca Laporan Operasional Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Di samping itu laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Mei 2024

Kepala Badan



Ditandatangani secara elektronik
Andin Hadiyanto



Daftar Isi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	xii
RINGKASAN DAN <i>FACE</i> LAPORAN KEUANGAN.....	1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	3
NERACA.....	4
LAPORAN OPERASIONAL	6
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	7
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	8
A. <i>PENJELASAN UMUM</i>	10
B. <i>PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN</i>	27
C. <i>PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA</i>	65
D. <i>PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL</i>	90
E. <i>PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</i>	100
F. <i>CATATAN PENTING LAINNYA</i>	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rekapitulasi Jumlah Entitas UAPPA-E1	15
Tabel 2 Ketentuan Perhitungan Penyisihan Piutang	19
Tabel 3 Masa Manfaat ATB	24
Tabel 4 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja BPPK Tahun 2023	27
Tabel 5 Revisi Anggaran Belanja BPPK Tahun 2023 per Kegiatan	27
Tabel 6 Alokasi Anggaran <i>Automatic Adjustment</i>	29
Tabel 7 Alokasi Tambahan Anggaran Pelatihan PSIAP	29
Tabel 8 Proporsi Pagu BPPK Berdasarkan Jenis Belanja	30
Tabel 9 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Tahun 2023	33
Tabel 10 Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2023 dan Tahun 2022	40
Tabel 11 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per Satuan Kerja	41
Tabel 12 Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja	41
Tabel 13 Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per Sumber Dana	42
Tabel 14 Rincian Belanja Berdasarkan Jenis Program/Fungsi/Kegiatan Tahun 2023	43
Tabel 15 Pagu dan Realisasi Belanja per Satuan Kerja Tahun 2023	45
Tabel 16 Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2023 dan Tahun 2022	46
Tabel 17 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2023	47
Tabel 18 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 dan Tahun 2022	48
Tabel 19 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2023	52
Tabel 20 Perbandingan Belanja Barang Tahun 2023 dan Tahun 2022	52
Tabel 21 Belanja Penanganan COVID-19 Tahun 2023	53
Tabel 22 Perbandingan Belanja COVID-19 Tahun 2023 dan Tahun 2022	53
Tabel 23 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2023 dan Tahun 2022	56
Tabel 24 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan Tahun 2022	56
Tabel 25 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan Tahun 2022	58
Tabel 26 Mutasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023	58
Tabel 27 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dan Tahun 2022	60
Tabel 28 Mutasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023	60
Tabel 29 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun 2023 dan Tahun 2022	61
Tabel 30 Mutasi Belanja Modal Lainnya Tahun 2023 (Aset Tak Berwujud)	62
Tabel 31 Mutasi Belanja Modal Lainnya Tahun 2023 (Aset Tetap Lainnya)	62
Tabel 32 Perbandingan Realisasi Belanja BLU Tahun 2023 dan Tahun 2022	63
Tabel 33 Rincian Kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2023	65

Tabel 34 Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2023.....	66
Tabel 35 Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023.....	67
Tabel 36 Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum per 31 Desember 2023.....	70
Tabel 37 Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2023	70
Tabel 38 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek Per 31 Desember 2023.....	71
Tabel 39 Rincian Persediaan Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	72
Tabel 40 Mutasi Nilai Persediaan	72
Tabel 41 Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin.....	73
Tabel 42 Mutasi Transaksi Gedung dan Bangunan	75
Tabel 43 Mutasi Aset Tetap Lainnya	77
Tabel 44 Mutasi Aset Tetap Lainnya	78
Tabel 45 Mutasi Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan	79
Tabel 46 Rincian Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	79
Tabel 47 Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	80
Tabel 48 Rincian Piutang Tagihan Tuntutan TP/TGR 31 Desember 2023.....	81
Tabel 49 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – TP/TGR.....	83
Tabel 50 Rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya 31 Desember 2023.....	84
Tabel 51 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya.....	85
Tabel 52 Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023.....	85
Tabel 53 Mutasi Nilai Aset Lain-lain.....	86
Tabel 54 Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya.....	87
Tabel 55 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023.....	87
Tabel 56 Rincian Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023.....	88
Tabel 57 Perbandingan Rincian PNBK 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.....	90
Tabel 58 Perbandingan Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.	91
Tabel 59 Perbandingan Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	92
Tabel 60 Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	93
Tabel 61 Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	94
Tabel 62 Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.....	95
Tabel 63 Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.....	96

Tabel 64 Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	97
Tabel 65 Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non-Operasional 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	97
Tabel 66 Koreksi Nilai Aset Non-Revaluasi per 31 Desember 2023	101
Tabel 67 Transaksi Antar-Entitas per 31 Desember 2023	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Estimasi dan Realisasi Pendapatan BPPK Per 31 Desember 2023.....	34
Gambar 2 Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Tahun 2023	42
Gambar 3 Anggaran dan Realisasi Belanja per Sumber Dana Tahun 2023	42
Gambar 4 Anggaran dan Realisasi Belanja Fungsi Pelayanan Umum Per Kegiatan Tahun 2023	44
Gambar 5 Anggaran dan Realisasi Belanja Fungsi Pendidikan per Kegiatan Tahun 2023	44
Gambar 6 Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2023 dan Tahun 2022.....	47



Pernyataan Tanggung Jawab



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

GEDUNG ARIMURTI LANTAI 2 JALAN PURNAWARMAN NOMOR 99 KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN 12110
TELEPON (021) 7394666 7260451 EXT. 621; FAKSIMILE (021) 7244912; SITUS: WWW.BPPK.KEMENKEU.GO.ID

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran (b) Neraca (c) Laporan Operasional (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 *Audited* sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran serta posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2024

Kepala Badan



Ditandatangani secara elektronik
Andin Hadiyanto



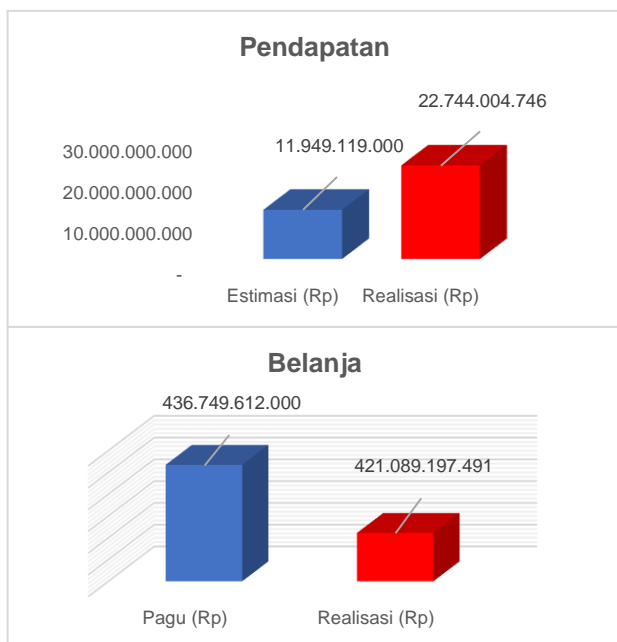
**Ringkasan dan *Face*
Laporan Keuangan BPPK
Tahun 2023 *Audited***



Laporan Keuangan BPPK TA 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Realisasi Pendapatan Negara mencapai 190,34% dan realisasi Belanja Negara mencapai 96,41%.



B. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset kewajiban dan ekuitas per 31 Desember 2023.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022	%
Aset Lancar	138.041.564.673	139.483.205.125	(1,03)
Aset Tetap	7.017.633.837.944	7.031.931.383.632	(0,20)
Piutang Jk Panjang	-	-	-
Aset Lainnya	4.873.437.368	6.995.395.441	(30,33)
Total Aset	7.160.548.839.985	7.178.409.984.198	(0,25)
Kewajiban	2.859.013.911	1.269.684.835	125,18
Ekuitas	7.157.689.826.074	7.177.140.299.363	(0,27)
Total Kewajiban & Ekuitas	7.160.548.839.985	7.178.409.984.198	(0,25)

C. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO beban surplus/defisit dari operasi surplus/defisit dari kegiatan non-operasional surplus/defisit sebelum pos luar biasa pos luar biasa dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

(Dalam Rupiah)	
Pendapatan Operasional	21.112.420.317
Beban Operasional	438.291.763.132
Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional	(170.591.544)
Defisit-LO	(417.349.934.359)

D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

(Dalam Rupiah)	
Ekuitas 1 Januari 2023	7.177.140.299.363
Defisit LO	(417.349.934.359)
Koreksi	(31.641.991)
Transaksi Antar Entitas	397.931.103.061
Ekuitas 31 Desember '23	7.157.689.826.074

E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

CaLK menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Neraca Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis kas sedangkan Neraca Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan basis akrual.



BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 30 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023		% thd Angg	31 DESEMBER
		ANGGARAN	REALISASI		2022
					REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	11.949.119.000	22.744.004.746	190,34	17.250.064.699
JUMLAH PENDAPATAN		11.949.119.000	22.744.004.746	190,34	17.250.064.699
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	9.876.406.000	9.517.666.400	96,37	51.711.867.368
Belanja Barang	B.4	364.361.763.000	353.648.825.777	97,06	51.711.867.368
Jumlah Belanja Operasi		374.238.169.000	363.166.492.177	97,04	333.084.766.192
Belanja Modal					
Belanja Peralatan dan Mesin	B.5.1	27.260.439.000	26.928.867.261	98,78	10.258.697.672
Belanja Gedung dan Bangunan	B.5.2	26.695.958.000	24.095.970.118	90,26	45.621.027.083
Belanja Modal Lainnya	B.5.5	2.118.153.000	1.936.996.876	91,45	312.104.220
Belanja Modal BLU		6.436.893.000	4.960.871.059	77,07	-
Jumlah Belanja Modal		62.511.443.000	57.922.705.314	92,66	56.191.828.975
JUMLAH BELANJA		436.749.612.000	421.089.197.491	96,41	389.276.595.167

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

NERACA

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATA TAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	KENAIKAN (PENURUNAN)	%
ASET					
ASET LANCAR					
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1	-	1.000.000	(1.000.000)	(100,00)
Kas pada Badan Layanan Umum	C.2	133.961.168.746	135.279.623.720	(1.318.454.974)	(0,97)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.3	557.592.506	97.687.500	459.905.006	470,79
Piutang Bukan Pajak	C.4	719.844.557	510.672.860	209.171.697	40,96
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak		(691.485.777)	(510.672.860)	(180.812.917)	35,41
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	C.5	353.337.500	226.007.500	127.330.000	56,34
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU		(202.017.900)	(201.381.250)	(636.650)	0,32
PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU (NETTO)		151.319.600	24.626.250	126.693.350	514,46
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	C.6	286.664.703	467.335.113	(180.670.410)	(38,66)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU		(286.664.703)	(467.335.113)	180.670.410	(38,66)
Persediaan	C.8	3.343.125.041	4.080.267.655	(737.142.614)	(18,07)
JUMLAH ASET LANCAR		138.041.564.673	139.483.205.125	(1.441.640.452)	(1,03)
ASET TETAP					
Tanah	C.9	5.872.378.852.000	5.872.378.852.000	-	0,00
Peralatan dan Mesin	C.10	423.594.922.495	418.329.969.501	5.264.952.994	1,26
Gedung dan Bangunan	C.11	1.271.841.746.848	1.255.475.700.321	16.366.046.527	1,30
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.12	-	-	-	0,00
Aset Tetap Lainnya	C.13	9.982.747.879	10.007.325.080	(24.577.201)	(0,25)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.14	12.315.575.728	29.375.500	12.286.200.228	41.824,65
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.15	(572.480.007.006)	(524.289.838.770)	(48.190.168.236)	9,19
JUMLAH ASET TETAP		7.017.633.837.944	7.031.931.383.632	(14.297.545.688)	(0,20)
PIUTANG JANGKA PANJANG					
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.16	1.502.085.261	1.515.243.043	(13.157.782)	(0,87)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.17	(1.502.085.261)	(1.515.243.043)	13.157.782	(0,87)
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.18	925.823.061	925.823.061	-	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.19	(925.823.061)	(925.823.061)	-	0,00
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		-	-	-	0,00

Lanjut...



BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

... lanjutan

(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATA TAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	KENAIKAN (PENURUNAN)	%
ASET LAINNYA					
Aset Tak Berwujud	C.20	10.022.176.354	10.231.219.768	(209.043.414)	(2,04)
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.21	1.508.925.644	0	1.508.925.644	0,00
Aset Lain-lain	C.22	12.109.451.354	15.047.191.782	(2.937.740.428)	(19,52)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	C.23	(18.767.115.984)	(18.283.016.109)	(484.099.875)	2,65
JUMLAH ASET LAINNYA		4.873.437.368	6.995.395.441	(2.121.958.073)	(30,33)
JUMLAH ASET		7.160.548.839.985	7.178.409.984.198	(17.861.144.213)	(0,25)
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang kepada Pihak Ketiga	C.24	2.538.012.380	1.110.932.258	1.427.080.122	128,46
Pendapatan Diterima Dimuka	C.25	321.001.531	158.752.577	162.248.954	102,20
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		2.859.013.911	1.269.684.835	1.589.329.076	125,18
JUMLAH KEWAJIBAN		2.859.013.911	1.269.684.835	1.589.329.076	125,18
EKUITAS					
Ekuitas	C.28	7.157.689.826.074	7.177.140.299.363	(19.450.473.289)	(0,27)
JUMLAH EKUITAS		7.157.689.826.074	7.177.140.299.363	(19.450.473.289)	(0,27)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		7.160.548.839.985	7.178.409.984.198	(17.861.144.213)	(0,25)

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	21.112.420.317	15.617.827.810
JUMLAH PENDAPATAN		21.112.420.317	15.617.827.810
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	11.037.342.900	52.276.995.464
Beban Persediaan	D.3	6.224.486.564	6.370.188.376
Beban Barang dan Jasa	D.4	292.370.472.835	235.530.520.780
Beban Pemeliharaan	D.5	28.118.624.417	23.877.384.847
Beban Perjalanan Dinas	D.6	25.971.670.775	15.549.924.054
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	74.581.544.266	77.900.686.852
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	(12.378.625)	947.055.455
Beban Lain-lain		-	-
JUMLAH BEBAN		438.291.763.132	412.452.755.828
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(417.179.342.815)	(396.834.928.018)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	(150.357.972)	56.551.845
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		1.898.388.733	518.595.152
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		2.048.746.705	462.043.307
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(20.233.572)	351.099.983
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		160.722.974	363.053.786
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		180.956.546	11.953.803
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(170.591.544)	407.651.828
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(417.349.934.359)	(396.427.276.190)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNBPN	D.12	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(417.349.934.359)	(396.427.276.190)

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
Ekuitas Awal	E.1	7.177.140.299.363	7.159.222.210.647
Surplus/Defisit LO	E.2	(417.349.934.359)	(396.427.276.190)
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	E.4	(31.641.991)	1.480.514.377
- Penyesuaian Nilai Aset	E.4.1	-	-
- Koreksi Nilai Persediaan	E.4.2	48.139.415	-
- Koreksi atas Reklasifikasi	E.4.3	11.169.000	-
- Selisih Revaluasi Aset	E.4.4	-	-
- Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.4.5	(90.950.406)	1.480.514.377
Lain-lain	E.4.6	-	-
Transaksi Antar Entitas	E.5	397.931.103.061	412.864.850.529
Kenaikan/Penurunan Entitas		(19.450.473.289)	17.918.088.716
Ekuitas Akhir	E.6	7.157.689.826.074	7.177.140.299.363



Catatan atas Laporan Keuangan



A. Penjelasan Umum

A. PENJELASAN UMUM

A.1 Profil dan Kebijakan Teknis BPPK

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) berkewajiban memberikan layanan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi di bidang keuangan negara khususnya bagi pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan guna mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan yaitu **Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif Kompetitif Inklusif dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Salah satu kunci penting bagi pemenuhan tingkat kepuasan atas layanan yang diberikan kepada unit pengguna khususnya di lingkungan Kementerian Keuangan adalah komitmen yang kuat dari seluruh jajaran BPPK.

Dalam mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan diperlukan sumber daya manusia yang andal dan berkualitas. Perubahan paradigma saat ini di mana sumber daya manusia adalah aset atau modal yang berharga dan perlu dikembangkan. BPPK tidak hanya sekedar menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tapi BPPK harus menjadi contoh pendidikan dan pelatihan yang mengembangkan modal manusia atau *human capital* tidak hanya di Kementerian Keuangan tetapi juga pengembangan modal sumber daya manusia pengelola keuangan negara bagi Republik Indonesia. BPPK diharapkan dapat mengembangkan sumber daya manusia Kementerian Keuangan sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan dan menghadapi tantangan yang ada.

Visi BPPK disusun dengan memperhatikan keselarasan dengan visi dan misi Kementerian Keuangan. Dengan visi yang baru BPPK berkomitmen untuk terus mencetak punggawa keuangan negara yang tidak hanya memiliki kualitas kompetensi dan kinerja tinggi tetapi juga beretika dalam rangka mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-124/PP/2020 tentang Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Tahun 2020-2024 visi dan misi BPPK adalah sebagai berikut:

A.1.1 Visi BPPK

Visi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan adalah Menghasilkan SDM Pengelola Keuangan Negara yang Unggul dan Beretika.

A.1.2 Misi BPPK

1. Mengelola pendidikan yang berkualitas tinggi dalam kerangka Kementerian Keuangan *Corporate University*.
2. Memperkuat pelatihan yang berdampak tinggi pada SDM Keuangan Negara dalam kerangka Kementerian Keuangan *Corporate University*.
3. Mengembangkan program sertifikasi kompetensi keuangan negara yang berkualitas dan *fit for purposes*.
4. Mewujudkan manajemen pengetahuan keuangan negara yang andal dalam kerangka Kementerian Keuangan *Corporate University*.
5. Mengembangkan sistem tata kelola berbasis digital dan manajemen sumber daya yang optimal.

A.1.3 Arah Kebijakan BPPK

Arah kebijakan BPPK pada tahun 2020 – 2024 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional dan tujuan Kementerian Keuangan serta mencapai sasaran strategis organisasi BPPK adalah sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi yang *fit for purpose* di bidang keuangan negara termasuk pada penguasaan teknologi informasi.
2. Pengelolaan beasiswa Kementerian Keuangan yang optimal.
3. Penguatan sistem pembelajaran berbasis digital dan pelatihan berdampak tinggi pada peningkatan kinerja keuangan negara.
4. Optimalisasi program sertifikasi kompetensi yang sesuai kebutuhan.
5. Penguatan kebijakan dan implementasi manajemen pengetahuan di lingkungan Kementerian Keuangan.
6. Organisasi dan SDM yang *agile* dalam rangka penguatan implementasi Kementerian Keuangan *Corporate University*.
7. Pemutakhiran sarana prasarana berwawasan lingkungan dan teknologi informasi dalam mendukung pembelajaran yang efektif dan efisien.

A.1.4 Tugas Fungsi dan Peran BPPK

BPPK beralamat di Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 BPPK mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan BPPK menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis rencana dan program pendidikan pelatihan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara dan manajemen pengetahuan;
2. pelaksanaan pendidikan pelatihan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara dan manajemen pengetahuan;
3. pemantauan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pendidikan pelatihan sertifikasi kompetensi pemanfaatan hasil pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara dan manajemen pengetahuan;
4. pelaksanaan administrasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan terdiri atas:

1. Sekretariat Badan;
2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial;
3. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan;
4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak;
5. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai;
6. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan;
7. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

PPK juga mempunyai Balai Diklat Keuangan yang merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan melalui Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Terdapat 11 (sebelas) Balai Diklat Keuangan dan 1 (satu) Balai Diklat Kepemimpinan sesuai dengan PMK Nomor 79/PMK.01/2022

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam penyusunan laporan keuangan entitas pelaporan pemerintah pusat menggunakan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4/KMK.06/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;

15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.06/2013 tentang Modul Penyusutan;
16. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/KM.6/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 Tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
17. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
18. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.
19. Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 29 Tahun 2020 (Khusus): Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19.

Laporan Keuangan ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPPK. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang. SAI meliputi: transaksi BMN transaksi persediaan transaksi pembayaran transaksi anggaran transaksi realisasi transaksi akrual transaksi BLU dan transaksi lainnya. Untuk mendukung penerapan SAI berbasis akrual dan terintegrasi maka digunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Modul-modul dalam Aplikasi SAKTI terdiri dari: Modul Penganggaran Modul Komitmen Modul Pembayaran Modul Bendahara Modul Persediaan Modul Aset Tetap Modul Piutang dan Modul Pelaporan. Keseluruhan proses transaksi keuangan dan barang termuat pada Modul Pelaporan. Modul Pelaporan ini menghasilkan laporan-laporan di antaranya: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Operasional (LO) Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Laporan Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini merupakan laporan gabungan dari seluruh jenjang struktural di bawah BPPK yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah entitas akuntansi dalam lingkup BPPK adalah 20 (dua puluh) entitas. Rincian entitas akuntansi tersebut tersaji pada tabel berikut.

Tabel 1 Rekapitulasi Jumlah Entitas UAPPA-E1

No	Kode	Uraian Wilayah	Jenis Kewenangan		Jumlah
			KP	KD	
1	0199	Sekretariat BPPK	1		1
2	0199	PKN STAN	1		1
3	0200	Prov. Jawa Barat		1	1
4	0300	Prov. Jawa Tengah		1	1
5	0400	Prov. DI Yogyakarta		1	1
6	0500	Prov. Jawa Timur		1	1
7	0700	Prov. Sumatra Utara		1	1
8	1100	Prov. Sumatra Selatan		1	1
9	1600	Prov. Kalimantan Timur		1	1
10	1700	Prov. Sulawesi Utara		1	1
11	1900	Prov. Sulawesi Selatan		1	1
12	2200	Prov. Bali		1	1
13	1351	Prov. Kalimantan Barat		1	1
14	0900	Prov. Riau		1	1
Jumlah			2	12	14

A.3 Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

BPPK menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Adapun Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui adanya pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4 Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan ini telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip dasar-dasar konvensi-konvensi aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Keuangan. Di samping itu dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan adalah sebagai berikut:

A.5.1 Pendapatan – LRA

Pendapatan – LRA

1. Pendapatan – LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2. Pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
3. Akuntansi Pendapatan – LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
4. Pendapatan – LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan –
LO

A.5.2 Pendapatan – LO

1. Pendapatan – LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2. Pendapatan – LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan Pendapatan – LO pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan diatur dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-17/MK.1/2015 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi Pendapatan Berbasis AkruaI Lingkup Kementerian Keuangan BA 015 sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - Pendapatan yang berasal dari BLU PKN STAN diantaranya: Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha Pendapatan Hasil Kerjasama Pemerintah Daerah Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU yang diakui setelah pengesahan BLU.
3. Akuntansi Pendapatan – LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
4. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
5. Semua Pendapatan – LO di Kementerian Keuangan yang belum diatur dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-17/MK.1/2015 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi Pendapatan Berbasis AkruaI Lingkup Kementerian Keuangan BA 015 mengikuti kebijakan akuntansi Pendapatan – LO secara umum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5.3 Belanja

Belanja

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
2. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
3. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuan belanja

terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

4. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

A.5.4 Beban

Beban

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
3. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

A.5.5 Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar Aset Tetap dan Aset Lainnya.

1. Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - ✓ Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung

- Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- ✓ Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
 - Piutang disajikan di neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Ketentuan mengenai perhitungan penyisihan piutang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 Ketentuan Perhitungan Penyisihan Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - ✓ harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
 - ✓ harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - ✓ harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

2. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh

pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - ✓ Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - ✓ Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - ✓ Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus ketinggalan jaman tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

3. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - ✓ Tanah;
 - ✓ Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - ✓ Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset

Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

4. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
- Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas dilakukan sebagai berikut:
 - ✓ Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - ✓ Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

5. Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar aset tetap dan

piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud (ATB) dan Aset Lain-lain.

- ATB merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Sesuatu diakui sebagai ATB diakui jika dan hanya jika:
 - ✓ Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
 - ✓ Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- Untuk keseragaman penyajian dan pengungkapan ATB di seluruh satuan kerja di Pemerintah Pusat tata cara penyajian dan pengungkapan ATB (sesuai Bultek SAP No.17) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/PMK.06/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

A.5.6 Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga Belanja yang Masih Harus Dibayar Pendapatan Diterima di Muka Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

A.5.7 Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

A.5.8 Amortisasi ATB

Amortisasi Aset Tak Berwujud

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 amortisasi dilakukan terhadap Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas antara lain meliputi:

- a. Perangkat Lunak (*Software*) Komputer;
- b. Lisensi;
- c. Waralaba (*Franchise*);
- d. Hak Cipta (*Copyright*); dan
- e. Hak Paten.

Amortisasi tidak dilakukan terhadap:

- ATB yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta (*Copyright*) dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pendelegasian kewenangan untuk dilakukan penghapusannya; dan
- ATB dalam kondisi usang dan/ atau rusak berat yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendelegasian kewenangan untuk dilakukan pemindahtanganan pemusnahan atau penghapusan.

Nilai yang dapat diamortisasi pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2016 untuk ATB yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2016. Untuk ATB yang diperoleh setelah tanggal 31 Desember 2016 nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai perolehan. Penentuan nilai yang dapat diamortisasi dilakukan untuk setiap unit ATB tanpa adanya nilai residu.

Amortisasi ATB dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dengan mengalokasikan nilai yang dapat dilakukan Amortisasi atas ATB secara merata setiap semester selama masa manfaat.

Penerapan atas Amortisasi Barang Milik Negara berupa ATB pada Entitas Pemerintah Pusat berdasarkan SAP Berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2016.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 masa manfaat Barang Milik Negara berupa ATB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3 Masa Manfaat ATB

Kode Barang					Uraian	Tahun
8	01	01	01	001	Software Komputer	4
8	01	01	01	002	Lisensi	10
8	01	01	01	003	Franchise	5
8	01	01	01	004	Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.I	70
8	01	01	01	005	Hak Paten Sederhana	10
8	01	01	01	008	Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.II	50
8	01	01	01	009	Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
8	01	01	01	010	Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan	50
8	01	01	01	011	Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
8	01	01	01	012	Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran	20
8	01	01	01	013	Paten Biasa	20
8	01	01	01	014	Merek	10
8	01	01	01	015	Desain Industri	10
8	01	01	01	016	Rahasia Dagang	10
8	01	01	01	017	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
8	01	01	01	018	Perlindungan Varietas Tanaman Musiman	20
8	01	01	01	019	Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
8	01	01	01	026	Peta RBI Skala Kecil (1:1.000.000. 1 : 500.000 1 : 250.000)	20
8	01	01	01	027	Peta RBI Skala Menengah (1:100.000. 1 : 50.000 1 : 25.000)	10
8	01	01	01	028	Peta RBI Skala Besar (1:10.000. 1 : 5.000 1 : 2.500 1 : 1.000)	5
8	01	01	01	029	Peta LLN Skala Kecil (1 : 500.000 1 : 250.000)	20
8	01	01	01	030	Peta LLN Skala Menengah (1 : 50.000)	12
8	01	01	01	031	Peta LPI Skala Kecil (1 : 250.000)	20

Kode Barang					Uraian	Tahun
8	01	01	01	032	Peta LPI Skala Menengah (1 : 50.000 1 : 25.000)	12
8	01	01	01	033	Peta LPI Skala Besar (1 : 10.000)	5
8	01	01	01	034	Peta Batas Wilayah Administrasi	10
8	01	01	01	035	Peta Delineasi Batas Wilayah Administrasi	5
8	01	01	01	036	Peta Batas Negara	10
8	01	01	01	037	Data Pasang Surut	20
8	01	01	01	038	Data GNSS	20
8	01	01	01	039	Data Gaya Berat	20
8	01	01	01	040	Data Pengukuran Sifat Datar Teliti	10
8	01	01	01	041	Citra Satelit Resolusi Tinggi	5
8	01	01	01	042	Citra Satelit Resolusi Sedang	10
8	01	01	01	043	Foto Udara	5
8	01	01	01	044	Peta Tematik Morfometri	5
8	01	01	01	045	Peta Tematik Penutup Lahan	5
8	01	01	01	046	Peta Tematik Sistem Lahan	5
8	01	01	01	047	Peta Tematik Lainnya	5
8	01	01	01	048	Atlas	10

A.5.9 Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2016 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.



B. Laporan Realisasi Anggaran

Catatan atas Laporan Keuangan

Pos Laporan Realisasi Anggaran

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan BPPK melakukan revisi pagu anggaran. Anggaran pendapatan dan belanja BPPK Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4 sedangkan revisi anggaran berdasarkan jenis kegiatan dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 4 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja BPPK Tahun 2023

Uraian	Estimasi/ Anggaran Awal (Rp)	Tahun 2023 Estimasi/ Anggaran Setelah Direvisi (Rp)	Perubahan (Rp)
Pendapatan			
Pendapatan BLU	9.965.000.000	9.965.000.000	-
PNBP Lainnya	1.984.119.000	1.984.119.000	-
Jumlah Pendapatan	11.949.119.000	11.949.119.000	-
Belanja			
Belanja Pegawai	11.332.860.000	9.876.406.000	(1.456.454.000)
Belanja Barang	339.071.759.000	364.361.763.000	25.290.004.000
Belanja Modal	55.840.616.000	62.511.443.000	6.670.827.000
Jumlah Belanja	406.245.235.000	436.749.612.000	30.504.377.000

Tabel 5 Revisi Anggaran Belanja BPPK Tahun 2023 per Kegiatan

Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Tahun 2023 Anggaran Setelah Direvisi (Rp)	Perubahan (Rp)
4678	Legislasi dan Litigasi	45.048.000	3.960.000	(41.088.000)
4679	Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum	122.813.793.000	117.940.223.000	(4.873.570.000)
4680	Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum	37.246.408.000	45.870.170.000	8.623.762.000
4681	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	660.939.000	683.116.000	22.177.000
4682	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	916.809.000	841.809.000	(75.000.000)
4683	Pengelolaan Organisasi dan SDM	190.153.307.000	217.647.938.000	27.494.631.000
4684	Pengelolaan Organisasi dan SDM	53.755.186.000	53.250.310.000	(504.876.000)
4685	Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal	66.290.000	82.162.000	15.872.000
4686	Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal	88.205.000	88.205.000	-
4687	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	499.250.000	341.719.000	(157.531.000)
	JUMLAH	406.245.235.000	436.749.612.000	30.504.377.000

Estimasi Pendapatan di lingkup BPPK tidak mengalami perubahan sepanjang tahun 2023. Adapun estimasi pendapatan di lingkup BPPK adalah sebagai berikut.

1. Estimasi Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan sebesar Rp6.915.000.000 pada PKN STAN. Nilai estimasi pendapatan tersebut merupakan estimasi penerimaan yang berasal dari biaya pendaftaran USM PKN STAN layanan terjemah ijazah dan biaya pelatihan brevet pajak.

2. Estimasi Jasa Layanan Perbankan BLU sebesar Rp3.000.000.000 pada PKN STAN. Estimasi ini merupakan estimasi penerimaan bunga deposito PKN STAN.
3. Estimasi Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung sebesar Rp50.000.000 pada PKN STAN. Estimasi ini merupakan estimasi penerimaan sewa gedung BLU PKN STAN.
4. Estimasi Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp873.769.000 pada Sekretariat BPPK, BDK Cimahi, BDK Denpasar, BDK Balikpapan, BDK Manado, dan BDK Makassar. Estimasi ini merupakan estimasi penerimaan dari lelang penjualan aset tetap berupa peralatan dan mesin.
5. Estimasi Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp18.000.000 pada BDK Malang. Estimasi ini merupakan estimasi penerimaan dari lelang penjualan aset tetap.
6. Estimasi Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan sebesar Rp66.550.000 pada Sekretariat BPPK, BDK Pekanbaru, BDK Palembang, BDK Cimahi, BDK Balikpapan, dan BDK Manado. Estimasi ini merupakan estimasi penerimaan dari sewa ruangan/gedung di lingkup BPPK.
7. Estimasi Pendapatan Pengujian Sertifikasi Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya sebesar Rp1.025.000.000 pada Pusdiklat Bea dan Cukai. Estimasi ini merupakan estimasi penerimaan biaya pendaftaran ujian sertifikasi kepebeanaan.

Pagu Anggaran Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan mengalami pergeseran sepanjang Tahun 2023. Pada Triwulan I Tahun 2023 terdapat revisi DIPA kewenangan DJA terkait dengan *Automatic Adjustment* TA 2023 yang ditetapkan melalui S-967/AG/AG.3/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Pengesahan Revisi Anggaran Unit dalam rangka Memenuhi Kebijakan *Automatic Adjustment* TA 2023 pada 12 Unit Eselon I di Lingkup Kementerian Keuangan. Adapun nilai *Automatic Adjustment* TA 2023 yang ditetapkan untuk BPPK adalah sebesar Rp5.187.356.000 sesuai dengan Nota Dinas Menteri Keuangan nomor ND-10/MK.1/2022 tentang Pemenuhan *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian Keuangan TA 2023. BPPK telah memenuhi target nilai tersebut yang diperoleh dari Sekretariat BPPK sebesar Rp2.687.356.000 dan PKN STAN sebesar Rp2.500.000.000 serta telah disampaikan melalui ND Kepala BPPK nomor ND-224/PP/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Usulan Revisi Anggaran *Automatic Adjustment* BPPK TA 2023. Rincian alokasi anggaran *Automatic Adjustment* adalah sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 6 Alokasi Anggaran Automatic Adjustment

No	Nama Satker	Pagu Awal	Blokir Automatic Adjustment	Total Pagu Akhir
1	Sekretariat BPPK (411868)	241.010.786.000	2.687.356.000	241.010.786.000
	Sekretariat BPPK	42.108.854.000		42.108.854.000
	Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial	119.123.410.000	2.011.356.000	119.123.410.000
	Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan	22.524.773.000		22.524.773.000
	Pusdiklat Pajak	18.686.502.000	276.000.000	18.686.502.000
	Pusdiklat Bea Cukai	26.046.166.000	400.000.000	26.046.166.000
	Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan	4.824.596.000		4.824.596.000
	Pusdiklat Keuangan Umum	7.696.485.000		7.696.485.000
2	Politenik Keuangan Negara STAN (477198)	92.006.608.000	2.500.000.000	92.006.608.000
	Jumlah	333.017.394.000	5.187.356.000	333.017.394.000

Selain itu terdapat revisi kewenangan kanwil yang dilakukan di Politeknik Keuangan Negara STAN antara jenis belanja dan antara Rincian Output (RO) sebesar Rp4.141.438.000. Revisi tersebut dilakukan dari Belanja Barang ke Belanja Modal dari RO Mahasiswa Pendidikan Program Diploma Keuangan RO Penerimaan Mahasiswa Baru dan RO Pendidikan Pelatihan Kerjasama ke RO Peralatan Fasilitas Perkantoran.

Pada periode Triwulan II tidak terdapat revisi DIPA yang dilakukan oleh unit Eselon I BPPK.

Sepanjang Triwulan III Tahun 2023 terdapat 3 (tiga) kali revisi lingkup unit Eselon I BPPK sebagai berikut.

1. Revisi anggaran kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) nomor S-331/AG/AG.3/2023 tanggal 2 Juli 2023 tentang Pengesahan Revisi Anggaran TA 2023 Unit Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (Revisi ke-2) sesuai dengan usulan revisi melalui ND Kepala BPPK nomor ND-66/PP/2023 tanggal 16 Mei 2023. Adapun revisi yang dilakukan adalah terkait dengan alokasi tambahan anggaran pelatihan PSIAP di satker lingkup BPPK dengan rincian berikut:

Tabel 7 Alokasi Tambahan Anggaran Pelatihan PSIAP

No	Nama Satker	Pagu Awal	Tambahan PSIAP	Pergeseran Anggaran	Total Pagu Akhir
1	Sekretariat Badan	42.597.069	-	(1.266.618)	41.330.451
2	Pusdiklat KM	119.123.410	-	(2.925.893)	116.197.517
3	Pusdiklat AP	22.379.599	-	(1.579.184)	20.800.415
4	Pusdiklat Pajak	18.668.961	4.537.234	(323.380)	22.882.815
5	Pusdiklat BC	25.842.878	-	150.444	25.993.322

No	Nama Satker	Pagu Awal	Tambahan PSIAP	Pergeseran Anggaran	Total Pagu Akhir
6	Pusdiklat KNPk	4.824.596	-	893.974	5.718.570
7	Pusdiklat KU	7.574.273	-	3.251.883	10.826.156
8	PKN STAN	92.006.608	-	(894.937)	91.111.671
9	BDK Medan	4.885.440	262.719	-	5.148.159
10	BDK Pekanbaru	5.368.701	425.180	501.575	6.295.456
11	BDK Palembang	4.405.908	502.907	-	4.908.815
12	BDK Cimahi	4.725.194	138.706	-	4.863.900
13	BDK Yogyakarta	9.820.427	389.059	-	10.209.486
14	BDK Malang	7.265.644	104.273	425.567	7.795.484
15	BDK Denpasar	6.698.767	1.667.588	486.349	8.852.704
16	BDK Pontianak	3.828.036	98.657	-	3.926.693
17	BDK Balikpapan	7.804.618	344.178	(819.780)	7.329.016
18	BDK Makassar	8.342.734	287.151	-	8.629.885
19	BDK Manado	6.689.429	355.747	-	7.045.176
20	BD Kepemimpinan	3.392.943	-	2.100.000	5.492.943
TOTAL		406.245.235	9.113.399	0	415.358.634

(dalam ribuan rupiah)

Adapun perubahan Proporsi Pagu BPPK berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Proporsi Pagu BPPK Berdasarkan Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Pagu Awal	Kenaikan/Penurunan	Pagu Akhir
1	Belanja Pegawai	11.332.860.000	-	11.332.860.000
2	Belanja Barang	334.930.321.000	6.899.997.000	341.830.318.000
	Operasional	97.465.188.000	(1.305.434.000)	96.159.754.000
	Non Operasional	237.465.133.000	8.205.431.000	245.670.564.000
3	Belanja Modal	59.982.054.000	2.213.402.000	62.195.456.000
TOTAL		406.245.235.000	9.113.399.000	415.358.634.000

2. Penetapan revisi anggaran kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) nomor S-441/AG/AG.3/2023 tanggal 28 Juli 2023 tentang Pengesahan Revisi Anggaran TA 2023 Unit Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sesuai dengan Surat Sekretaris Jenderal nomor ND-11/SJ/SJ.1/2023 tanggal 10 Juli 2023 hal Penyampaian Persetujuan Pembukaan *Automatic Adjustment* (AA) Belanja Kementerian Keuangan TA 2023. Alokasi yang disetujui untuk buka blokir pada BPPK adalah sebesar Rp5.187.256.000 yang digunakan untuk anggaran renovasi rumah dinas kebutuhan AKP Insidental dan kebutuhan kegiatan pembentukan karakter mahasiswa PKN STAN. Selain kebutuhan tersebut telah teridentifikasi pula beberapa kekurangan anggaran Pelatihan Teknis Kesamaptaaan dan Pelatihan Orientasi Pengembangan Karakter pada

beberapa satker sebagai dampak dari adanya perubahan desain pembelajaran pada pelatihan dimaksud.

3. Revisi kewenangan DJA terkait penambahan pagu BPPK dari optimalisasi anggaran kegiatan Asean Chairmanship dari BKF untuk memenuhi anggaran *Executive Training* Pimpinan Kementerian Keuangan Tahun 2023. Ditetapkan melalui surat penetapan revisi anggaran kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) nomor S-581/AG/AG.3/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Pengesahan Revisi Anggaran TA 2023 Unit Lingkup Kementerian Keuangan sesuai dengan usulan revisi melalui Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-971/SJ.1/2023 tanggal 8 September 2023. Alokasi yang disetujui untuk dipindahkan ke DIPA BPPK setelah melalui penelitian dan penelaahan usulan revisi adalah sebesar Rp5.756.000.000.

Pada Triwulan IV Tahun 2023 terdapat 3 (tiga) kali revisi lingkup Eselon I BPPK dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Revisi DIPA Tanggal 13 Oktober 2023 (Kewenangan Pemindahan Belanja Operasional ke Belanja Non-Operasional). Revisi ini merupakan tindak lanjut revisi kewenangan DJA periode sebelumnya guna pemenuhan kebutuhan anggaran *executive training* bagi pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Keuangan TA 2023 dengan memindahkan anggaran belanja operasional BPPK yang bersumber dari BKF ke belanja non operasional untuk kegiatan *executive training* dimaksud. Revisi disahkan melalui Surat Direktur Jenderal Anggaran nomor S-624/AG/AG.3/2023 tanggal 13 Oktober 2023 hal Pengesahan Revisi Anggaran TA 2023 pada 5 Unit Eselon I Lingkup Kementerian Keuangan. Dalam revisi DJA ini mengakomodasi beberapa kebutuhan, antara lain:
 - a. pemenuhan anggaran *Executive Training* sebesar Rp9.756.000.000;
 - b. pemenuhan kekurangan anggaran *access point* PKN STAN sebesar Rp1.566.000.000;
 - c. realokasi anggaran honor piket pelatihan menjadi belanja pegawai (uang lembur) sebesar Rp55.000.000;
 - d. penyesuaian anggaran dan jamlator Pelatihan Sistem Informasi Perpajakan (PSIAP);
 - e. pemenuhan anggaran Peralatan Fasilitas Perkantoran berupa fasilitas pendukung Mess Sekretariat Badan dan Ruang Menteri peningkatan fasilitas asrama Pusdiklat AP BC dan KU sebesar total Rp953.544.000;
 - f. penambahan anggaran Belanja Operasional Sekretariat Badan dan Pusdiklat BC sebesar total Rp637.000.000;

- g. penambahan anggaran mutasi pegawai sebesar total Rp864.722.000; dan
 - h. beberapa penambahan anggaran lainnya.
2. Revisi DIPA Tanggal 2 November 2023 Kewenangan DJA (Pemenuhan Anggaran Karyasiswa Beasiswa). Revisi DIPA ini disahkan melalui Surat Direktur Jenderal Anggaran nomor S-770/AG/AG.3/2023 tanggal 2 November 2023 hal Pengesahan Revisi Anggaran TA 2023 Unit Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Dalam revisi ini mengakomodir beberapa kebutuhan diantaranya:
- a. pemenuhan kebutuhan anggaran Karyasiswa Beasiswa sebesar Rp5.552.697.000;
 - b. pergeseran anggaran untuk pemenuhan kebutuhan pelatihan yang sebesar Rp593.727.000;
 - c. optimalisasi anggaran yang digunakan untuk penambahan belanja modal di beberapa satuan kerja lingkup BPPK.
3. Revisi DIPA Tanggal 15 Desember 2023 Kewenangan DJA (Pemenuhan Pagu Minus Belanja Pegawai Kementerian Keuangan). Revisi kewenangan DJA ini disahkan melalui Surat Direktur Jenderal Anggaran nomor S-868/AG/AG.3/2023 tanggal 15 Desember 2023 hal Pengesahan Revisi Anggaran TA 2023 pada 11 Unit lingkup Kementerian Keuangan. Revisi ini dilakukan untuk memenuhi pagu minus belanja pegawai Kemenkeu sesuai nota dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-1319/SJ.1.2023 tanggal 4 Desember 2023 hal Usulan Revisi Anggaran dalam rangka Penyelesaian Kekurangan Belanja Pegawai Kementerian Keuangan TA 2023. Dengan adanya revisi ini pagu belanja pegawai di BPPK dipindahkan sebanyak Rp1.217.511.000 ke Sekretariat Jenderal.

B.2 PENDAPATAN

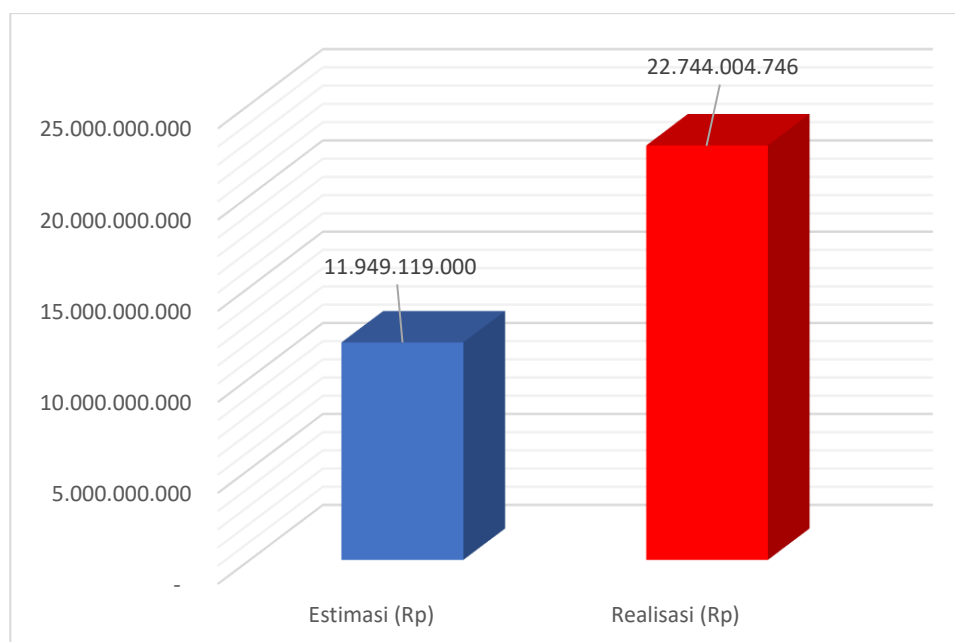
*Realisasi Pendapatan
Rp22.744.004.746*

Realisasi Pendapatan tahun 2023 adalah sebesar Rp22.744.004.746 atau mencapai 190,34% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp11.949.119.000. Pendapatan lingkup BPPK terdiri dari Pendapatan dari Badan Layanan Umum (BLU) PKN STAN dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Tahun 2023

Kode Akun	Uraian Pendapatan	Estimasi Pendapatan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	PENDAPATAN BLU	9.965.000.000	18.058.654.223	181,22
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	6.915.000.000	5.007.170.424	72,41
424215	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang	-	213.875.000	000
424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	-	847.800.000	000
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	-	3.159.905.331	000
424313	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	-	4.170.394.068	000
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	3.000.000.000	3.892.815.979	129,76
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	-	7.001.721	000
424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	50.000.000	387.344.000	774,69
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	-	368.547.700	000
424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	-	3.800.000	000
	PENDAPATAN PNPB LAINNYA	1.984.119.000	4.685.350.523	236,14
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	-	29.475.600	000
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	873.769.000	1.635.600.165	187,19
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	18.800.000	262.788.568	1397,8
425131	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	66.550.000	127.842.400	192,10
425289	Pendapatan Pengujian Sertifikasi Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya	1.025.000.000	1.891.000.000	184,49
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	-	443.200.000	000
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	-	90.870.000	000
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	107.249.202	000
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	2.331.000	000
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	25.640.666	000
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	39.340.082	000
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	30.012.840	000
	TOTAL	11.949.119.000	22.744.004.746	190,34

Komposisi estimasi dan realisasi pendapatan BPPK sampai dengan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Estimasi dan Realisasi Pendapatan BPPK Per 31 Desember 2023

Realisasi PNPB tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp5.493.940.047 atau 31,85% dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun penjelasan realisasi pendapatan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan yang berasal dari Pendapatan BLU PKN STAN sebesar Rp5.738.373.096 atau 46,58% di mana pada tahun 2023 sebesar Rp5.007.170.424 dan tahun 2022 sebesar Rp4.864.002.500 dengan penjelasan sebagai berikut.
 - a. Terdapat peningkatan pada Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan sebesar Rp143.167.924 atau 2,94% di mana pada tahun 2023 sebesar Rp5.007.170.424 dan pada tahun 2022 sebesar Rp4.864.002.500. Pendapatan ini berasal dari penerimaan pendaftaran USM PKN STAN sebesar Rp2.156.400.000 layanan terjemah ijazah sebesar Rp66.880.000 dan adanya pendapatan yang berasal dari biaya pendidikan Program Diploma IV Manajemen Keuangan dan Akuntansi Sektor Publik dari Kementerian PUPR sebesar Rp784.000.000 pendapatan layanan pelaksanaan pendidikan Semester I Program Diploma IV kerja sama RDTL (Republik Demokratic Timor Leste) sebesar Rp1.081.057.924 layanan kerjasama program pembibitan dengan Pemda/Pemkot (Pemkab Jember Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Pemkot Cirebon Pemkab Bojonegoro) sebesar Rp912.480.000 pendapatan denda perpustakaan sebesar Rp2.536.000 dan lainnya. Peningkatan ini disebabkan adanya pendapatan yang berasal dari kerja sama program pembibitan dengan

- Pemda dan program Diploma IV RDTL (Republik Demokracic Timor Leste) yang dimulai di tahun 2023.
- b. Pada tahun 2023 terdapat realisasi Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha-Uang sebesar Rp213.875.000. Pendapatan ini berasal dari biaya Pelatihan Penilaian Tingkat Dasar BMN yang dibiayai dari hibah Asian Development Bank.
 - c. Pada tahun 2023 terdapat realisasi Pendapatan Hasil Kerja sama Perorangan sebesar Rp847.800.000. Pendapatan ini berasal dari biaya pelatihan atau ujian brevet pajak dan biaya ujian ulang brevet pajak yang pada tahun sebelumnya diakui sebagai Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan.
 - d. Peningkatan pada Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha sebesar Rp1.787.957.331 atau 130,32% di mana pada tahun 2023 sebesar Rp3.159.905.331 dan pada tahun 2022 sebesar Rp1.371.948.000. Peningkatan ini disebabkan pada tahun 2023 kerja sama pendidikan dan pelatihan dengan Kementerian Negara/Lembaga lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun kerja sama pelatihan seperti pelatihan manajemen aset pelatihan penyusunan RAB dan RSB dan pelatihan akuntansi yang telah dilakukan sepanjang tahun 2023 dengan beberapa Kementerian/Lembaga diantaranya: Kementerian Perhubungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Kesehatan PPK Kemayoran dan BPKD DKI Jakarta.
 - e. Peningkatan pada Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah sebesar Rp1.339.229.068 atau naik 47,30% di mana pada tahun 2023 sebesar Rp4.170.394.068 dan pada tahun 2022 sebesar Rp2.831.165.000. Jumlah kerja sama pelatihan dengan Pemerintah Daerah lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun kerja sama yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2023 antara lain: kerjasama pelatihan akuntansi keuangan Badan Usaha Milik Daerah (Kabupaten Kudus Pemkab Bojonegoro Pemkab Serang Pemkab Morowali) pelatihan keuangan daerah (Pemkab Bojonegoro) pelatihan manajemen resiko (Pemkab Bojonegoro) pelatihan perencanaan pembangunan (Pemkab Bojonegoro) pelatihan penilaian properti (Pemkab Bitung) pelatihan bendahara pengeluaran SKPD (Pemkab Surabaya Pemkot Manado) narasumber Forum Rencana Kerja (Kota Depok) pelatihan penilai PBB (Pemkab Yahukimo) jurusita perpajakan (Pemprov Kalbar Pemkab Dumai Pemkot Tangerang Selatan Pemkot Makassar) pelatihan pemeriksa pajak

- (Pemkot Makassar Pemkab Dumai) pelatihan penilai BMD pelatihan penilai PBB dan lainnya.
- f. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU mengalami peningkatan sebesar Rp867.535.352 atau 28,68% dibandingkan tahun sebelumnya di mana pada tahun 2023 sebesar Rp3.892.815.979 dan pada tahun 2022 sebesar Rp3.025.280.627. Peningkatan ini berasal dari naiknya suku bunga deposito dibandingkan tahun sebelumnya.
 - g. Terdapat Pendapatan Lain-lain BLU pada tahun 2023 sebesar Rp7.001.721 pendapatan ini berasal dari Denda Pekerjaan atas Pembayaran Termin II Pekerjaan Rehabilitasi Gedung B PKN STAN Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Surat Perjanjian Nomor PRJ-284/PPK/STAN/2023 tanggal 20 November 2023.
 - h. Peningkatan pada Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung sebesar Rp269.184.000 atau 227,81% di mana pada tahun 2023 sebesar Rp387.344.000 dan tahun 2022 sebesar Rp118.160.000. Pendapatan ini berasal dari penyewaan gedung G PKN STAN yang pada tahun 2023 ini lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya.
 - i. Peningkatan pada Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan sebesar Rp259.822.700 atau 238,97% di mana pada tahun 2023 sebesar Rp368.547.700 dan tahun 2022 sebesar Rp108.725.000. Pendapatan ini berasal dari sewa kantin lapangan basket lapangan tenis dan lapangan *mini soccer* PKN STAN.
 - j. Peningkatan pada Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.800.000 atau 280% di mana pada tahun 2023 sebesar Rp3.800.000 dan tahun 2022 sebesar Rp1.000.000.
2. Secara total PNBPN Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp244.433.049 atau turun 4,96% di mana pada tahun 2023 sebesar Rp4.685.350.523 dan pada tahun 2022 sebesar Rp4.929.783.572 PNBPN Lainnya lingkup BPPK merupakan penerimaan pendapatan yang bersifat insidental, kecuali untuk Pendapatan Pengujian Sertifikasi Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya. Penerimaan pendapatan yang berasal dari PNBPN lainnya sebagian mengalami peningkatan dan sebagian turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dengan penjelasan berikut ini.
- a. Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp23.630.100 atau 404,24% di mana pada tahun 2023 sebesar Rp29.475.600 dan tahun 2022 sebesar Rp5.845.500. Pendapatan

- ini berasal dari penjualan pemusnahan arsip inaktif pada satker Sekretariat BPPK PKN STAN BD Pim Magelang dan BDK Denpasar.
- b. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.275.675.213 atau 354,43% di mana pada tahun 2023 sebesar Rp1.635.600.165 dan pada tahun 2022 sebesar Rp359.924.952. Peningkatan ini terutama disebabkan pada tahun 2023 terdapat lelang kendaraan dinas di beberapa satker. Beberapa lelang yang telah dilakukan selama tahun 2023 adalah lelang kendaraan dinas roda empat (Sekretariat Badan BDK Yogyakarta BDK Palembang BDK Malang BDK Balikpapan BD Pim Magelang) lelang kendaraan dinas roda dua (Sekretariat Badan BD Pim Magelang) lelang perlengkapan asrama dan lelang Peralatan dan Mesin lainnya (alat penghancur kertas alat rumah tangga lainnya alat tenis meja *filing cabinet hub* kasur laptop kipas angin *lcd locker* meja mesin potong rumput monografi PC komputer telepon printer televisi UPS AC kursi dan lainnya) pada satker Sekretariat Badan BDK Medan BDK Malang BDK Makassar BDK Cimahi dan BDK Balikpapan.
 - c. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp104.118.368 atau 65,62% realisasi tahun 2023 ini adalah sebesar Rp262.788.568 dan tahun sebelumnya sebesar Rp158.670.200. Beberapa lelang BMN yang tercatat pada akun ini adalah lelang kursi meja PC laptop kendaraan roda 2 (dua) lelang bongkaran berupa kayu dan baja ringan gedung dan beberapa BMN lainnya.
 - d. Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan mengalami penurunan sebesar Rp85.772.461 atau 40,15% realisasi tahun 2023 ini adalah sebesar Rp127.842.400 dan pada tahun sebelumnya sebesar Rp213.614.861. Pendapatan sewa lingkup BPPK sampai dengan tahun 2023 ini berasal dari penerimaan dari penerimaan dari sewa kantin di Sekretariat BPPK penerimaan dari sewa asrama (BDK Pekanbaru BDK Yogyakarta BDK Balikpapan BDK Malang BDK Manado BDK Cimahi BD Pim Magelang dan Pusdiklat) serta sewa *guest house* pada Pusdiklat. Penurunan ini disebabkan adanya pembayaran sewa yang dibayarkan pada tahun 2022 untuk beberapa tahun ke depan.
 - e. Pendapatan Pengujian Sertifikasi Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp680.000.000 atau 56,15% dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi tahun 2023 ini adalah sebesar Rp1.891.000.000 dan pada tahun sebelumnya sebesar Rp1.211.000.000.

Penerimaan ini berasal dari kegiatan Sertifikasi Ahli Kepabeanaan dan Cukai pada Pusdiklat Bea Cukai yang mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun sebelumnya.

- f. Pendapatan Pendidikan Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp113.600.000 atau 20,40%. Realisasi tahun 2023 adalah sebesar Rp443.200.000 dan pada tahun sebelumnya sebesar Rp556.800.000. Pendapatan ini berasal dari penggantian biaya pendidikan di PKN STAN bagi mahasiswa yang tidak melanjutkan pendidikan karena mengundurkan diri atau *drop out*.
- g. Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan mengalami penurunan sebesar Rp902.500.000. Penerimaan ini berasal pembayaran kegiatan Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) Pejabat Lelang pada Pusdiklat KNPK pada tahun 2022 sedangkan pada tahun 2023 tidak terdapat realisasi dari pendapatan ini.
- h. Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain mengalami penurunan sebesar Rp1.420.000. Realisasi tahun 2023 adalah sebesar Rp90.870.000 dan pada tahun sebelumnya sebesar Rp92.290.000. Pendapatan ini berasal dari pembayaran atau pelunasan ganti kerugian negara atas ikatan dinas pegawai pada tahun 2023 terdapat setoran ganti rugi sebesar yang berasal dari pegawai yang mengundurkan diri dari Kementerian Keuangan. Pegawai tersebut adalah Ferry Irawan (Rp4.750.000), Astriani Saputri (Rp5.500.000), Nur Tri Wibowo (Rp51.620.000), dan Nur Fitrianiingsih (Rp29.000.000).
- i. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah mengalami penurunan sebesar Rp271.350.827 atau 71,67% dari tahun sebelumnya di mana pada tahun 2023 terdapat realisasi sebesar Rp107.249.202 dan pada tahun sebelumnya sebesar Rp378.600.029. Pendapatan ini berasal dari pembayaran denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan dari penyedia yang disetorkan ke kas negara. Adapun pendapatan denda sampai dengan tahun 2023 antara lain berasal dari pengadaan AC dan keterlambatan penyelesaian pengadaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan talud dan pagar serta pemeliharaan gedung kantor dan kelas di BDK Manado sebesar Rp58.093.248 denda keterlambatan pekerjaan pengadaan dari penyedia di BDK Medan sebesar Rp101.864 denda atas keterlambatan pengadaan seragam mahasiswa di PKN STAN sebesar Rp40.978.378 denda keterlambatan pekerjaan renovasi lanjutan

- asrama C/tandon air/gedung B di BDK Malang sebesar Rp6.399.912 dan denda keterlambatan pekerjaan di BDK Makassar sebesar Rp1.675.800.
- j. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu turun sebesar Rp13.579.747 atau 85,35% di mana realisasi tahun 2023 ini adalah sebesar Rp2.331.000 dan pada tahun sebelumnya sebesar Rp15.910.747. Pendapatan ini berasal dari pengembalian uang makan bulan Desember 2022 pada BDK Pekanbaru.
- k. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu turun sebesar Rp143.552.423 atau 84,85% di mana realisasi tahun 2023 adalah sebesar Rp25.640.666 dan pada tahun sebelumnya sebesar Rp169.193.089. Pendapatan ini berasal dari pengembalian belanja barang tahun lalu beberapa satker di lingkungan BPPK diantaranya:
- 1) pengembalian kelebihan pembayaran jasa akomodasi DTSD Pajak II Angkatan II dan IV TA 2015 sebesar Rp16.499.300 pada Sekretariat BPPK (Pusdiklat Pajak);
 - 2) pengembalian kelebihan pembayaran pembelian buku yang tercatat dua kali sebesar Rp824.968 pada PKN STAN;
 - 3) pengembalian kelebihan pembayaran dari penyedia sebesar Rp3.500.000 pada Sekretariat BPPK;
 - 4) pengembalian kelebihan pembayaran dari penyedia terkait dengan temuan Itjen sebesar Rp416.398 pada BDK Yogyakarta;
 - 5) pengembalian kelebihan pembayaran honorarium narasumber sebesar Rp3.240.000 pada BDK Makassar; dan
 - 6) pengembalian belanja honorarium PPNPN sebesar Rp1.160.000 pada BDK Medan.
- l. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu mengalami penurunan sebesar Rp768.658.656 atau turun 95,13% dari tahun sebelumnya di mana realisasi tahun 2023 adalah sebesar Rp39.340.082 dan pada tahun sebelumnya sebesar Rp807.998.738. Pendapatan ini berasal dari setoran angsuran dari CV Simpul Prima Gemilang atas kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan asrama Pusdiklat Keuangan Umum (pembayaran Tahap I, Tahap II, dan Tahap III).
- m. Pendapatan Anggaran Lain-lain mengalami penurunan sebesar Rp27.422.616 atau turun 47,75% dimana realisasi pada tahun 2023

sebesar Rp30.012.840 sedangkan realisasi pada tahun sebelumnya adalah sebesar Rp57.435.456. Pendapatan ini berasal dari pembayaran kekurangan setor sewa kantin tahun 2002 dan 2003 di PKN STAN sebesar Rp27.625.000 dan biaya penggantian penggunaan listrik dan air oleh penyedia di BDK Balikpapan sebesar Rp2.387.840.

Perbandingan realisasi pendapatan BPPK Tahun 2023 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 10 Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2023 dan Tahun 2022

Akun	Uraian Pendapatan	Realisasi PNBP		Kenaikan (Penurunan)	
		31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Rp	%
	PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM	18.058.654.223	12.320.281.127	5.738.373.096	46,58
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	5.007.170.424	4.864.002.500	143.167.924	2,94
424215	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang	213.875.000	-	213.875.000	-
424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	847.800.000	-	847.800.000	-
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	3.159.905.331	1.371.948.000	1.787.957.331	130,32
424313	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	4.170.394.068	2.831.165.000	1.339.229.068	47,30
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	3.892.815.979	3.025.280.627	867.535.352	28,68
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	7.001.721	-	7.001.721	-
424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	387.344.000	118.160.000	269.184.000	227,81
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	368.547.700	108.725.000	259.822.700	238,97
424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	3.800.000	1.000.000	2.800.000	280,00
	PENDAPATAN PNBP LAINNYA	4.685.350.523	4.929.783.572	(244.433.049)	(4,96)
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	29.475.600	5.845.500	23.630.100	404,24
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1.635.600.165	359.924.952	1.275.675.213	354,43
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	262.788.568	158.670.200	104.118.368	65,62
425131	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	127.842.400	213.614.861	(85.772.461)	(40,15)
425289	Pendapatan Pengujian Sertifikasi Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya	1.891.000.000	1.211.000.000	680.000.000	56,15
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	443.200.000	556.800.000	(113.600.000)	(20,40)
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	-	902.500.000	(902.500.000)	(100,00)
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	90.870.000	92.290.000	(1.420.000)	(1,54)
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	107.249.202	378.600.029	(271.350.827)	(71,67)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	2.331.000	15.910.747	(13.579.747)	(85,35)
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	25.640.666	169.193.089	(143.552.423)	(84,85)
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	39.340.082	807.998.738	(768.658.656)	(95,13)
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	30.012.840	57.435.456	(27.422.616)	(47,75)
	JUMLAH	22.744.004.746	17.250.064.699	5.493.940.047	31,85

Adapun Rincian estimasi dan realisasi PNBP per Satuan Kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per Satuan Kerja

No	Kode Satker	Satuan Kerja	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	411868	BPPK Pusat	1.851.899.000	2.652.252.123	143,22
2	477198	PKN STAN	9.965.000.000	18.637.788.569	187,03
3	561199	BDK Medan	-	177.552.793	0,00
4	675720	BDK Pekanbaru	3.000.000	18.402.000	613,40
5	561204	BDK Palembang	3.706.000	132.598.988	3577,95
6	622429	BDK Cimahi	5.925.000	115.648.099	1951,87
7	561178	BDK Yogyakarta	-	141.254.536	0,00
8	561182	BDK Malang	18.800.000	167.639.937	891,70
9	675741	BDK Denpasar	60.000.000	45.121.569	75,20
10	675734	BDK Pontianak	-	107.000.000	0,00
11	561232	BDK Balikpapan	11.285.000	203.012.839	1798,96
12	561225	BDK Makassar	4.000.000	125.515.800	3137,90
13	636799	BDK Manado	25.504.000	86.893.248	340,70
14	411874	BD Pim Magelang	-	133.324.245	0,00
		TOTAL	11.949.119.000	22.744.004.746	190,34

B.3 BELANJA

*Realisasi Belanja
Rp421.089.197.491*

Realisasi belanja selama tahun 2023 adalah sebesar Rp421.089.197.491 atau 96,41% dari anggaran belanja sebesar Rp436.749.612.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

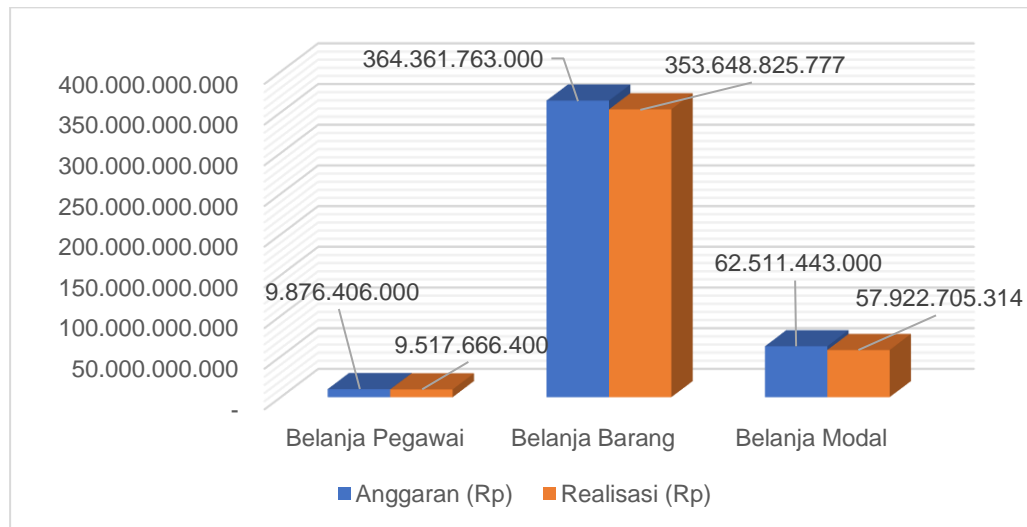
Tabel 12 Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja

Kode Jenis Belanja	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
51	Belanja Pegawai	9.876.406.000	9.518.227.000	96,37
52	Belanja Barang	364.361.763.000	354.391.836.290	97,26
53	Belanja Modal	62.511.443.000	57.922.705.314	92,66
	Total Belanja Bruto	436.749.612.000	421.832.768.604	96,58
	Pengembalian Belanja		(743.571.113)	
	Belanja Netto	436.749.612.000	421.089.197.491	96,41

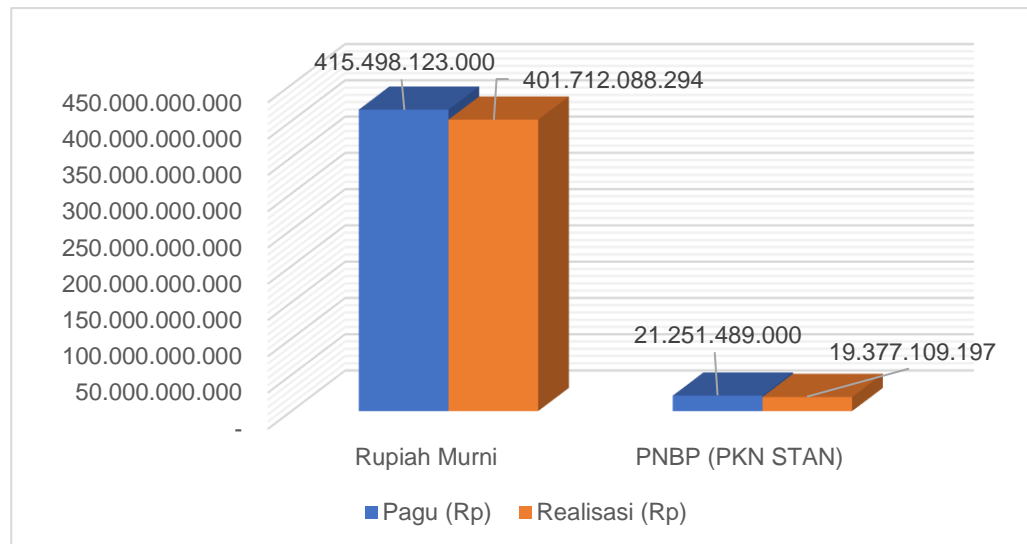
Tabel 13 Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per Sumber Dana

No	Jenis Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Rupiah Murni	415.498.123.000	401.712.088.294	96,68
2	PNBP (PKN STAN)	21.251.489.000	19.377.109.197	91,18
	TOTAL	436.749.612.000	421.089.197.491	96,41

Komposisi pagu anggaran dan realisasi belanja tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 2 dan Gambar 3.



Gambar 2 Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Tahun 2023

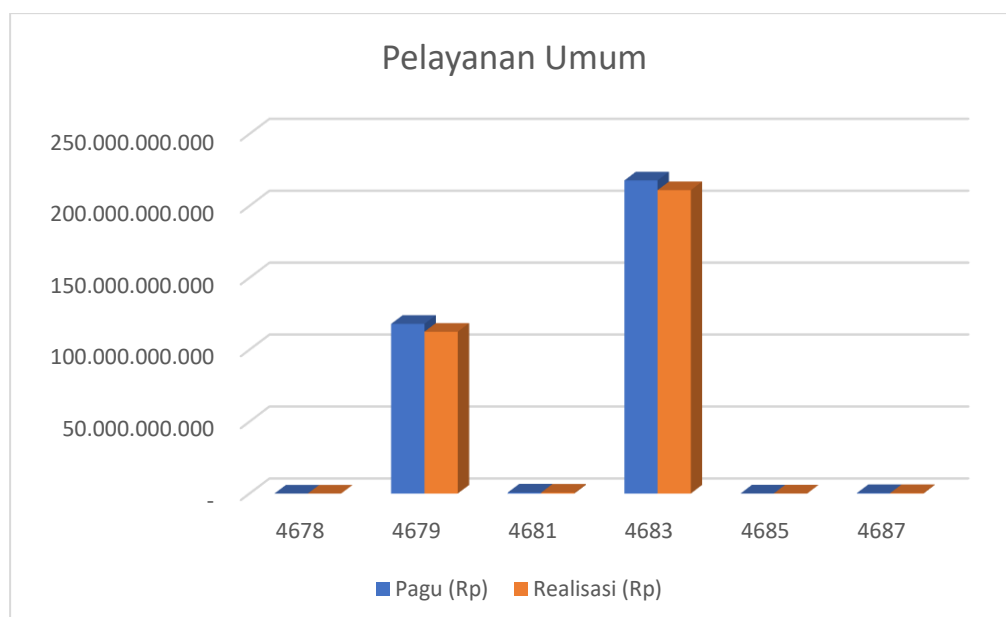


Gambar 3 Anggaran dan Realisasi Belanja per Sumber Dana Tahun 2023

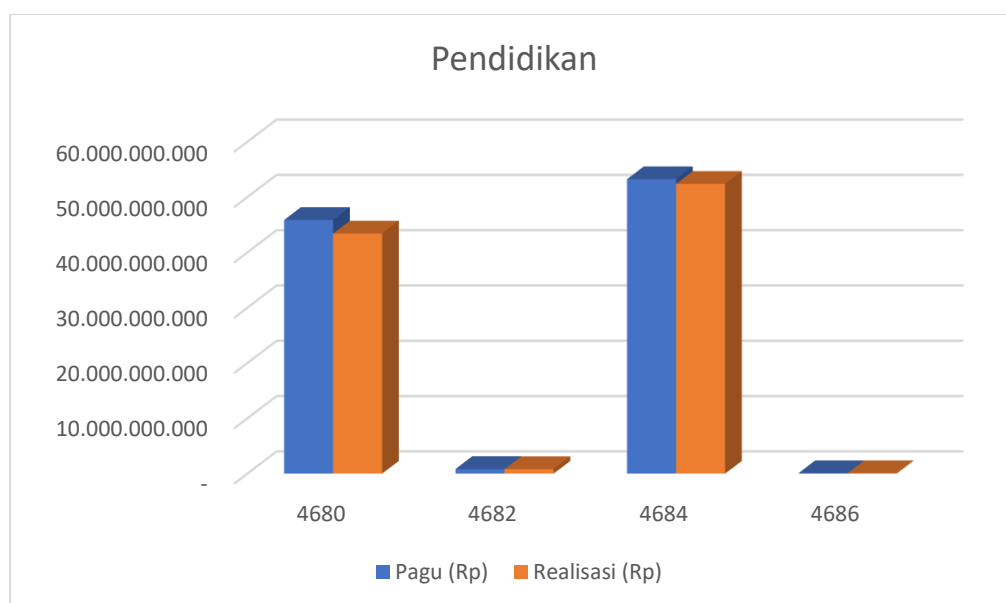
Realisasi belanja berdasarkan jenis kegiatan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 14 dan Gambar 4.

**Tabel 14 Rincian Belanja Berdasarkan Jenis Program/Fungsi/Kegiatan
Tahun 2023**

Kode Program /Fungsi/ Kegiatan	Nama Program/Fungsi/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
WA	Program Dukungan Manajemen	436.749.612.000	421.089.197.491	96,41
01	Pelayanan Umum	336.699.118.000	324.384.265.549	96,34
4678	Legislasi dan Litigasi	3.960.000	-	000
52	<i>Belanja Barang</i>	3.960.000	-	000
4679	Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum	117.940.223.000	112.486.974.569	95,38
52	<i>Belanja Barang</i>	72.085.775.000	68.997.069.865	95,72
53	<i>Belanja Modal</i>	45.854.448.000	43.489.904.704	94,84
4681	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	683.116.000	605.693.252	88,67
52	<i>Belanja Barang</i>	683.116.000	605.693.252	88,67
4683	Pengelolaan Organisasi dan SDM	217.647.938.000	210.897.827.501	96,90
51	<i>Belanja Pegawai</i>	7.802.863.000	7.483.655.400	95,91
52	<i>Belanja Barang</i>	209.845.075.000	203.414.172.101	96,94
4685	Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal	82.162.000	64.138.100	78,06
52	<i>Belanja Barang</i>	82.162.000	64.138.100	78,06
4687	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	341.719.000	329.632.127	96,46
52	<i>Belanja Barang</i>	341.719.000	329.632.127	96,46
10	Pendidikan	100.050.494.000	96.704.931.942	96,66
4680	Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum	45.870.170.000	43.416.982.860	94,65
52	<i>Belanja Barang</i>	29.213.175.000	28.984.182.250	99,22
53	<i>Belanja Modal</i>	16.656.995.000	14.432.800.610	86,65
4682	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	841.809.000	821.858.050	97,63
52	<i>Belanja Barang</i>	841.809.000	821.858.050	97,63
4684	Pengelolaan Organisasi dan SDM	53.250.310.000	52.390.337.571	98,39
51	<i>Belanja Pegawai</i>	2.073.543.000	2.034.011.000	98,09
52	<i>Belanja Barang</i>	51.176.767.000	50.356.326.571	98,40
4686	Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal	88.205.000	75.753.461	85,88
52	<i>Belanja Barang</i>	88.205.000	75.753.461	85,88



Gambar 4 Anggaran dan Realisasi Belanja Fungsi Pelayanan Umum Per Kegiatan Tahun 2023



Gambar 5 Anggaran dan Realisasi Belanja Fungsi Pendidikan per Kegiatan Tahun 2023

Adapun penjelasan realisasi belanja berdasarkan fungsi secara umum sebagai berikut:

- a. Pelayanan Umum : realisasi ini terutama berasal dari penyelenggaraan beasiswa lingkup Kementerian Keuangan kegiatan pelatihan baik klasikal maupun digital kegiatan seminar/lokakarya *Training of Trainers* keperluan perkantoran keperluan-keperluan lainnya penunjang TUSI pengadaan belanja

modal yang pada tahun ini terutama terkait dengan peningkatan fasilitas asrama satker lingkup BPPK berupa renovasi asrama dan pembelian perlengkapan asrama renovasi gedung kendaraan dinas dan beberapa kegiatan lainnya;

- b. Pendidikan: realisasi ini terutama berasal dari penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Keuangan PKN STAN kerja sama pelatihan antara PKN STAN dengan Lembaga atau Pemerintah Daerah dan pengadaan di lingkup PKN STAN.

Pagu dan realisasi anggaran per Satuan Kerja di lingkungan BPPK dapat dilihat pada tabel berikut Tabel 15.

Tabel 15 Pagu dan Realisasi Belanja per Satuan Kerja Tahun 2023

No	Kode Satker	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	411868	Sekretariat Badan	254.353.362.000	249.530.108.711	98,10
2	477198	Politeknik Keuangan Negara STAN	100.050.494.000	96.704.931.942	96,66
3	561199	BDK Medan	5.176.637.000	4.690.210.767	90,60
4	675720	BDK Pekanbaru	6.387.908.000	5.866.983.937	91,85
5	561204	BDK Palembang	5.008.341.000	4.525.991.181	90,37
6	622429	BDK Cimahi	5.290.397.000	4.989.164.315	94,31
7	561178	BDK Yogyakarta	10.565.834.000	9.770.951.385	92,48
8	561182	BDK Malang	8.007.173.000	7.136.252.166	89,12
9	675741	BDK Denpasar	8.895.791.000	7.380.936.810	82,97
10	675734	BDK Pontianak	4.134.728.000	3.854.007.495	93,21
11	561232	BDK Balikpapan	7.533.446.000	6.656.757.658	88,36
12	561225	BDK Makassar	8.327.741.000	7.741.338.924	92,96
13	636799	BDK Manado	7.093.760.000	6.490.036.845	91,49
14	411874	BD Kepemimpinan Magelang	5.924.000.000	5.751.525.355	97,09
TOTAL			436.749.612.000	421.089.197.491	96,41

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya realisasi belanja pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp31.812.602.324 atau naik 8,17% di mana realisasi tahun 2023 adalah sebesar Rp421.089.197.491 dan pada tahun sebelumnya sebesar Rp389.276.595.167. Adapun peningkatan ini terutama berasal dari peningkatan belanja barang yang berasal dari:

1. realisasi pembayaran beasiswa kepada penerima beasiswa/karyasiswa lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya;
2. kegiatan pelatihan telah banyak yang dilaksanakan secara klasikal sehingga realisasi terkait penyelenggaraan pelatihan seperti belanja honorarium

narasumber/pengajar ATK pelatihan konsumsi perjalanan dinas dan lainnya meningkat dibandingkan periode sama tahun sebelumnya terutama pada pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Reguler lainnya;

3. belanja langganan daya dan jasa (listrik air telepon) meningkat sehubungan dengan meningkatnya WFO (*Work From Office*) dan pelaksanaan kegiatan pelatihan secara klasikal;
4. kegiatan perkuliahan mahasiswa di PKN STAN yang telah dilaksanakan secara luring sehingga realisasi dari penyelenggaraan Program Diploma Keuangan PKN STAN mengalami peningkatan; serta
5. adanya pelatihan *Training of Trainers* Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PU) yang dilaksanakan di tahun 2023.

Adapun realisasi Belanja Modal juga mengalami peningkatan yang secara umum berasal dari:

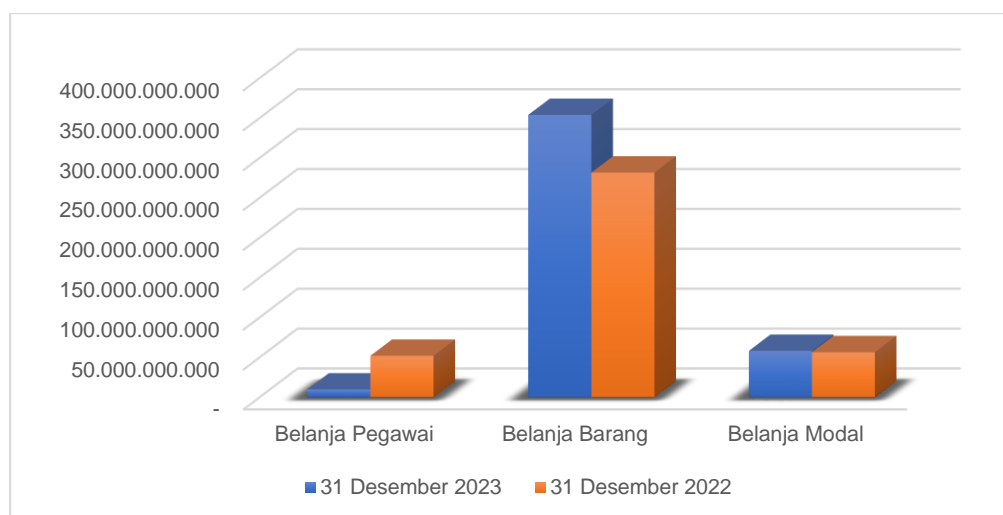
1. pekerjaan peningkatan fasilitas asrama lingkup BPPK berupa pekerjaan renovasi asrama dan pengadaan perlengkapan untuk fasilitas di dalam asrama;
2. pekerjaan konstruksi (jasa konsultan perencana manajemen konstruksi dan pelaksana konstruksi) pada pembangunan gedung asrama mahasiswa dan masjid PKN STAN;
3. pekerjaan jasa konsultan perencanaan konstruksi dan jasa konsultan manajemen konstruksi pembangunan gedung BDK Denpasar; dan
4. pengadaan kendaraan dinas dan beberapa pengadaan lainnya.

Penurunan terjadi pada Belanja Pegawai karena adanya sentralisasi pembayaran gaji di lingkungan Kementerian Keuangan di mana mulai bulan Juli 2022 pembayaran gaji pegawai BPPK dibayarkan oleh Sekretariat Jenderal.

Perbandingan realisasi belanja BPPK menurut jenis belanja antara tahun 2023 dan tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 16 dan Gambar 6.

Tabel 16 Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2023 dan Tahun 2022

Kode Jenis Belanja	Jenis Belanja	Realisasi Belanja (Rp)		Naik (Turun)	
		31 Desember 2023	31 Desember 2022	Rupiah	%
51	Belanja Pegawai	9.517.666.400	51.711.867.368	(42.194.200.968)	(81,59)
52	Belanja Barang	353.648.825.777	281.372.898.824	72.275.926.953	25,69
53	Belanja Modal	57.922.705.314	56.191.828.975	1.730.876.339	3,08
	Belanja Netto	421.089.197.491	389.276.595.167	31.812.602.324	8,17



Gambar 6 Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2023 dan Tahun 2022

B.4 Belanja Pegawai

*Belanja Pegawai
Rp9.517.666.400*

Realisasi Belanja Pegawai pada tahun 2023 dan tahun 2022 masing-masing sebesar Rp9.517.666.400 dan Rp51.711.867.368. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai BPPK pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp42.194.200.968 atau turun 81,59% dibanding realisasi periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan adanya kebijakan sentralisasi pembayaran gaji pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan mulai bulan Juli tahun 2022 gaji pegawai dibayarkan melalui DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sesuai dengan KMK Nomor 249 Tahun 2022.

Informasi pagu dan realisasi anggaran belanja pegawai tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 17 sedangkan perbandingan antara realisasi belanja pegawai tahun 2023 dan tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 17 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2023

Akun	Belanja Pegawai	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	9.577.496.000	9.323.464.000	97,35
5122	Belanja Lembur	298.910.000	194.763.000	65,16
	Jumlah Bruto	9.876.406.000	9.518.227.000	96,37

Akun	Belanja Pegawai	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Pengembalian Belanja		(560.600)	
	Jumlah Neto	9.876.406.000	9.517.666.400	96,37

Tabel 18 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 dan Tahun 2022

Akun	Belanja Pegawai	Realisasi Belanja (Rp)		Naik (Turun)	
		31 Des 2023	31 Des 2022	Rupiah	%
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	9.323.464.000	51.688.529.584	(42.365.065.584)	(81,96)
5122	Belanja Lembur	194.763.000	48.661.000	146.102.000	300,24
	Jumlah Bruto	9.518.227.000	51.737.190.584	(42.218.963.584)	(81,60)
	Pengembalian Belanja	(560.600)	(25.323.216)	24.762.616	(97,79)
	Jumlah Neto	9.517.666.400	51.711.867.368	(42.194.200.968)	(81,59)

B.5 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp353.648.825.777

Realisasi Belanja Barang periode tahun 2023 dan tahun 2022 masing-masing sebesar Rp353.648.825.777 dan Rp281.372.898.824.

Realisasi Belanja Barang periode tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp72.275.926.953 atau 25,69% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun penjelasan kondisi belanja barang selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Barang Operasional digunakan untuk kegiatan operasional perkantoran. Realisasi pada Belanja Barang Operasional antara lain digunakan untuk pembayaran gaji/honorarium PPNPN (petugas kebersihan pramubakti satpam dokter pengemudi perawat) pengadaan seragam bagi pegawai dan PPNPN pemberian bantuan komunikasi bagi pegawai pembelian *new normal kit* (masker *hand sanitizer* suplemen/obat-obatan alat-alat kesehatan) pembayaran honorarium operasional satker (pembayaran honorarium pengelola keuangan APBN seperti KPA PPK PPSPM PPBJ Pengurus BMN Pengurus Keuangan Bendahara Pengeluaran Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran Pembantu staf PPK staf KPA) biaya penggunaan *Call Center* belanja perlengkapan Poliklinik kantor belanja terkait dengan pelaksanaan tes COVID-19 pembayaran langganan lisensi aplikasi pembelian keperluan kebersihan serta keperluan-keperluan perkantoran lainnya. Belanja Barang Operasional lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu turun sebesar Rp2.130.126.974 atau turun 4,68% di mana pada tahun 2023 adalah sebesar Rp43.422.321.145 dan tahun sebelumnya sebesar Rp45.552.448.119. Penurunan terutama berasal dari penurunan

belanja COVID-19 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya antara lain berkurangnya belanja perlengkapan *new normal kit* (masker *hand sanitizer* suplemen/obat-obatan alat kesehatan) belanja perlengkapan Poliklinik belanja terkait dengan pelaksanaan tes rapid dan tes swab PCR serta belanja untuk bantuan komunikasi pegawai lingkup BPPK.

2. Belanja Barang Non Operasional lingkup BPPK digunakan untuk kegiatan pelatihan seminar lokakarya karyasiswa pendidikan diploma dan beberapa kegiatan lainnya. Belanja Barang Non Operasional lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu terdapat kenaikan sebesar Rp39.191.171.542 atau 29,85% dari tahun sebelumnya. Realisasi tahun 2023 sebesar Rp170.468.735.549 sedangkan pada tahun sebelumnya sebesar Rp131.277.564.007. Realisasi belanja ini terutama berasal dari pembayaran terkait penyelenggaraan beasiswa (*tuition fee living allowance visa health insurance international travel book allowance*) realisasi terkait penyelenggaraan kegiatan pelatihan/seminar/lokakarya di Pusdiklat dan Balai Diklat baik yang dilakukan secara klasikal maupun digital (seperti: pembayaran honorarium petugas dalam penyelenggaraan pelatihan konsumsi peserta pelatihan dan lain-lain) dan penyelenggaraan program Diploma Keuangan PKN STAN. Selain itu terdapat realisasi dari kegiatan pengelolaan keuangan BMN dan Umum Kajian Akademis Pembelajaran Terintegrasi pengembangan SDM sertifikasi kompetensi manajemen pengetahuan Regional Training Center (RTC) *Training of Trainers* Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan Pengembangan SDM dan kegiatan lainnya. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya peningkatan realisasi dari pembayaran beasiswa karyasiswa dimana jumlah karyasiswa meningkat dibandingkan tahun sebelumnya peningkatan pelatihan klasikal (terutama pada pelatihan samapta pelatihan dasar beberapa pelatihan reguler) peningkatan pada kegiatan perkuliahan Diploma PKN STAN yang sudah dilaksanakan secara tatap muka langsung secara penuh dan adanya pelatihan *Training of Trainers* Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan yang dilaksanakan di tahun 2023.
3. Belanja Persediaan lingkup BPPK tidak hanya digunakan untuk keperluan perkantoran tetapi sebagian besar digunakan untuk pembelian ATK dan keperluan pelatihan. Belanja Barang Persediaan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu terdapat kenaikan sebesar Rp843.438.102 atau 17,30% di mana pada tahun 2023 sebesar Rp5.717.944.520 dan pada tahun sebelumnya sebesar Rp4.874.506.418. Pada tahun 2023 ini lebih tinggi dari

periode yang sama tahun sebelumnya yang disebabkan telah mulai dilaksanakannya kegiatan pelatihan klasikal sehingga pembelian ATK pelatihan pun meningkat; aktivitas perkuliahan secara luring di PKN STAN mengalami peningkatan sehingga ATK perkantoran ATK siswa ATK perlengkapan kelas dan keperluan kebersihan juga meningkat; peningkatan WFO (*Work From Office*) sehingga persediaan untuk keperluan perkantoran juga meningkat. Adapun realisasi belanja barang persediaan berasal dari penyediaan keperluan pelatihan seperti: ATK pelatihan perlengkapan asrama seragam peserta dan obat-obatan peserta pelatihan serta belanja untuk pembelian ATK perkantoran obat-obatan poliklinik dan lain-lain

4. Belanja Jasa digunakan untuk pembayaran honorarium narasumber atau pengajar kegiatan pelatihan/seminar/lokakarya pembayaran langganan daya dan jasa dan lainnya. Belanja Jasa lebih tinggi dibanding dengan tahun sebelumnya yaitu terdapat peningkatan sebesar Rp16.370.919.464 atau 31,73% di mana realisasi tahun 2023 sebesar Rp67.961.822.713 dan pada tahun sebelumnya sebesar Rp51.590.903.249. Kenaikan tersebut terutama berasal dari pembayaran honorarium narasumber/pengajar pada kegiatan pelatihan/seminar/lokakarya di Pusdiklat dan Balai Diklat baik pelatihan digital maupun klasikal kemudian berasal juga dari pembayaran tagihan langganan daya dan jasa (listrik air telepon) pembayaran honorarium pengajar PKN STAN sehubungan dengan telah dilaksanakannya pelatihan secara klasikal dan meningkatnya WFO (*Work From Office*) serta pembayaran honorarium narasumber pelatihan *Training of Trainers* Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan yang dilaksanakan di tahun 2023. Selain itu terdapat juga pembayaran jasa pelatihan pihak ketiga pada kegiatan karyasiswa beasiswa jasa akomodasi pelatihan (*laundry* cuci perlengkapan asrama) pembayaran sewa-sewa baik untuk keperluan pelatihan perkantoran dan kegiatan SPMB Alih Program (seperti: sewa kendaraan, mesin fotocopy laptop dan perlengkapan pelatihan lainnya) dan lain-lain.
5. Belanja Pemeliharaan digunakan untuk pemeliharaan aset/BMN di lingkungan BPPK. Belanja Pemeliharaan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu mengalami peningkatan sebesar Rp3.618.465.260 atau 14,59% di mana realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp28.414.076.599 dan pada tahun sebelumnya sebesar Rp24.795.611.339. Pemeliharaan dilakukan sesuai dengan kebutuhan satuan kerja di lingkungan BPPK dimana aset pada tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun pemeliharaan yang telah dilakukan pada tahun 2023 diantaranya: pemeliharaan Gedung dan

Bangunan pemeliharaan Peralatan dan Mesin (antara lain: pemeliharaan kendaraan roda empat kendaraan roda dua genset AC hidran PC laptop printer meja kursi LCD dan inventaris kantor lainnya) serta pemeliharaan *Annual Technical Support* (ATS) pada satuan kerja lingkup BPPK.

6. Belanja perjalanan dalam negeri BPPK sebagian besar digunakan untuk perjalanan dinas peserta pelatihan dan sebagian untuk perjalanan dinas pegawai terkait pelaksanaan penugasan. Belanja Perjalanan Dalam Negeri mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp4.497.507.527 atau 32,15% di mana pada tahun 2023 sebesar Rp18.487.019.183 dan pada tahun sebelumnya sebesar Rp13.989.511.656. Kenaikan ini berasal dari pembayaran perjalanan dinas peserta pelatihan seperti kegiatan pelatihan dasar bagi CPNS di lingkungan Kementerian Keuangan pelatihan samapta kepemimpinan dan pelatihan-pelatihan lain yang telah dilaksanakan secara klasikal oleh Pusdiklat maupun Balai Diklat. Selain itu terdapat pembayaran biaya perjalanan dinas sehubungan dengan mutasi pegawai baik di lingkup eselon I BPPK maupun antar unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan perjalanan dinas sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan pegawai perjalanan dinas dalam rangka aktivitas pengabdian masyarakat oleh PKN STAN dan perjalanan dinas pengajar/narasumber pelatihan/seminar. Adapun realisasi belanja perjalanan dinas yang cukup signifikan terutama berasal dari realisasi perjalanan dinas pelatihan klasikal pada Pelatihan Dasar CPNS Pelatihan Pimpinan dan pelatihan regular lainnya serta realisasi yang berasal dari mutasi pejabat/pegawai lingkup BPPK.
7. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri mengalami peningkatan sebesar Rp5.335.855.733 atau 3.179,46% di mana pada tahun sebelumnya terdapat realisasi sebesar Rp167.822.710. Realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp5.503.678.443 berasal dari pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan Global Council of Corporate Universities Award (Global CCU Award) dan Global CCU Forum 2023 di India serta mengikuti kegiatan konferensi International *Joint Research* ke Kamboja dan Filipina.
8. Belanja Barang BLU mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.949.776.773 atau 52,29% realisasi pada tahun 2023 adalah sebesar Rp14.416.238.138 dan pada tahun sebelumnya sebesar Rp9.466.461.365. Peningkatan ini sehubungan dengan aktivitas SPMB Reguler yang sudah dimulai sejak Semester 1 serta kenaikan intensitas Diklat Kerjasama BLU. Selain itu, mulai tahun 2023 sebagian honor PPNPN dibayarkan menggunakan belanja BLU.

Informasi pagu dan realisasi anggaran belanja barang tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 19 sedangkan perbandingan antara realisasi belanja barang Tahun 2023 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 20.

Tabel 19 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2023

Akun	Belanja Pegawai	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5211	Belanja Barang Operasional	44.570.106.000	43.422.321.145	97,42
5212	Belanja Barang Non Operasional	173.043.832.000	170.468.735.549	98,51
5218	Belanja Barang Persediaan	6.288.949.000	5.717.944.520	90,92
5221	Belanja Jasa	70.845.307.000	67.961.822.713	95,93
5231	Belanja Pemeliharaan	29.174.775.000	28.414.076.599	97,39
5241	Belanja Perjalanan dalam negeri	20.028.221.000	18.487.019.183	92,30
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	5.595.977.000	5.503.678.443	98,35
5251	Belanja Barang BLU	14.814.596.000	14.416.238.138	97,31
	Jumlah Bruto	364.361.763.000	354.391.836.290	97,26
	Pengembalian Belanja		(743.010.513)	
	Jumlah Neto	364.361.763.000	353.648.825.777	97,06

Tabel 20 Perbandingan Belanja Barang Tahun 2023 dan Tahun 2022

Akun	Belanja Barang	Realisasi Belanja (Rp)		Naik (Turun)	
		31 Desember 2023	31 Desember 2022	Rupiah	%
5211	Belanja Barang Operasional	43.422.321.145	45.552.448.119	(2.130.126.974)	(4,68)
5212	Belanja Barang Non Operasional	170.468.735.549	131.277.564.007	39.191.171.542	29,85
5218	Belanja Barang Persediaan	5.717.944.520	4.874.506.418	843.438.102	17,30
5221	Belanja Jasa	67.961.822.713	51.590.903.249	16.370.919.464	31,73
5231	Belanja Pemeliharaan	28.414.076.599	24.795.611.339	3.618.465.260	14,59
5241	Belanja Perjalanan dalam negeri	18.487.019.183	13.989.511.656	4.497.507.527	32,15
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	5.503.678.443	167.822.710	5.335.855.733	3.179,46
5251	Belanja Barang BLU	14.416.238.138	9.466.461.365	4.949.776.773	52,29
	Jumlah Bruto	354.391.836.290	281.714.828.863	72.677.007.427	25,80
	Pengembalian Belanja	(743.010.513)	(341.930.039)	(401.080.474)	117,30
	Jumlah Neto	353.648.825.777	281.372.898.824	72.275.926.953	25,69

Belanja terkait dengan penanganan COVID-19 di lingkungan BPPK disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 21 Belanja Penanganan COVID-19 Tahun 2023

Akun	Belanja COVID-19	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	890.811.000	58.303.803	6,55
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	366.325.000	10.851.490	2,96
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	176.429.000	2.110.000	1,20
	Total Belanja	1.433.565.000	71.265.293	4,97

Realisasi belanja BPPK terkait penanganan COVID-19 pada tahun 2023 ini merupakan realisasi belanja COVID-19 sampai dengan Semester I Tahun 2023 yang digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. akun 521131 digunakan untuk pembelian perlengkapan pelindung diri (seperti: masker *face shield* sarung tangan dan APD) perlengkapan kebersihan (*hand sanitizer* sabun cuci tangan desinfektan) biaya tes swab PCR tes swab antigen dalam rangka penanggulangan COVID-19;
2. akun 521841 digunakan untuk pembelian perlengkapan pelindung diri (seperti: masker *face shield* sarung tangan dan APD) perlengkapan kebersihan (*hand sanitizer* sabun cuci tangan desinfektan) yang dimaksudkan sebagai persediaan; dan
3. akun 522192 digunakan untuk pembayaran pembayaran penggantian biaya tes kesehatan (*PCR swab test*) pegawai dan peserta pelatihan.

Adapun rincian realisasi belanja dalam rangka penanganan COVID-19 per satuan kerja dapat dilihat pada lampiran Laporan Keuangan.

Tabel 22 Perbandingan Belanja COVID-19 Tahun 2023 dan Tahun 2022

Akun	Belanja COVID-19	Realisasi Belanja (Rp)		Naik (Turun)	
		31 Des 2023	31 Des 2022	Rupiah	%
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	58.303.803	1.905.636.920	(1.847.333.117)	(96,94)
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	497.830.384	(497.830.384)	(100,00)
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	10.851.490	400.616.523	(389.765.033)	(97,29)
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2.110.000	116.797.882	(114.687.882)	(98,19)
	Total Belanja Bruto	71.265.293	2.920.881.709	(2.849.616.416)	(97,56)

Belanja COVID-19 mengalami penurunan sebesar Rp2.849.616.416 atau turun 97,56% dibandingkan tahun sebelumnya seiring dengan menurunnya kasus COVID-19. Adapun penjelasan terkait penurunan tersebut adalah sebagai berikut:

1. akun belanja 521131 (Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19) mengalami penurunan sebesar Rp1.847.333.117 atau turun 96,94% hal ini disebabkan berkurangnya belanja kebutuhan perlengkapan pelindung diri (seperti: masker *face shield* sarung tangan dan APD) berkurangnya perlengkapan kebersihan (*hand sanitizer* sabun cuci tangan desinfektan) berkurangnya biaya tes swab PCR tes swab antigen bantuan komunikasi dan biaya lisensi tidak terdapat realisasi;
2. akun belanja 521241 (Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19) tidak terdapat pagu dan realisasi di tahun 2023 hal ini disebabkan karena Pendidikan mahasiswa PKN STAN sudah dilakukan secara luring sedangkan pada tahun sebelumnya terdapat realisasi sebesar Rp497.830.384;
3. akun belanja 521841 (Belanja Barang Persediaan – Penanganan Pandemi COVID-19) turun sebesar Rp389.765.033 atau 97,29% hal ini disebabkan berkurangnya kebutuhan atas perlengkapan pelindung diri seperti masker *hand sanitizer* dan lain-lain; dan
4. akun belanja 522192 (Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19) turun sebesar Rp114.687.882 atau turun 98,19% hal ini disebabkan berkurangnya kebutuhan terhadap jasa penyemprotan desinfektan di lingkungan kantor pembayaran honorarium tim tes swab PCR pembayaran penggantian biaya tes kesehatan (*PCR swab test*) pegawai dan peserta pelatihan.

Sesuai dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-24/PB/PB.6/2023 tanggal 24 Agustus 2023 maka penggunaan akun belanja khusus COVID-19 tidak lagi digunakan mulai Semester II Tahun 2023 sehingga capaian diatas hanya sampai periode Semester I Tahun 2023.

B.6 Belanja Modal

Belanja Modal
Rp57.922.705.314

Realisasi Belanja Modal tahun 2023 dan tahun 2022 masing-masing sebesar Rp57.922.705.314 dan Rp56.191.828.975. Belanja modal merupakan

pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.730.876.339 atau 3,08% dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa penjelasan terkait penyerapan anggaran belanja modal tahun 2023.

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu naik sebesar Rp16.670.169.589 atau 162,50% di mana pada tahun 2023 sebesar Rp26.928.867.261 dan pada tahun sebelumnya sebesar Rp10.258.697.672. Peningkatan ini disebabkan pagu anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun ini lebih besar dari tahun sebelumnya dan adanya pembelian untuk peningkatan fasilitas asrama lingkup BPPK. Adapun secara ringkas realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2023 adalah pembelian perlengkapan untuk peningkatan asrama Pusdiklat dan Balai Diklat Keuangan (seperti: kasur tempat tidur meja belajar lemari meubelari dan lain-lain) pengadaan kendaraan dinas pengadaan *access point* pengadaan furniture asrama PKN STAN dan pengadaan lainnya. Sedangkan pada tahun sebelumnya terdapat pengadaan kendaraan dinas pengadaan meubelair laptop perlengkapan asrama Pusdiklat Balai Diklat dan PKN STAN.
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya yaitu turun sebesar Rp21.525.056.965 atau turun 47,18% di mana realisasi tahun 2023 adalah sebesar Rp24.095.970.118 dan tahun sebelumnya sebesar Rp45.621.027.083. Penurunan ini disebabkan pagu belanja modal gedung dan bangunan tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sesuai dengan rencana kebutuhan BMN serta adanya pembangunan konstruksi gedung pendidikan di PKN STAN yang cukup signifikan. Beberapa pengadaan Belanja Modal yang tahun 2023 yang cukup signifikan antara lain: pekerjaan renovasi asrama dalam rangka peningkatan fasilitas asrama satuan kerja lingkup BPPK (Pusdiklat Bea dan Cukai Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan BDK Balikpapan BDK Malang BDK Yogyakarta) pekerjaan konsultan perencana konstruksi pembangunan gedung asrama mahasiswa dan masjid PKN STAN pekerjaan jasa konsultan perencanaan konstruksi dan jasa konsultan manajemen konstruksi pembangunan gedung BDK Denpasar dan beberapa pengadaan lainnya. Pada tahun sebelumnya terdapat realisasi pada pengadaan konstruksi terdapat di Sekretariat BPPK dan PKN STAN yaitu untuk lanjutan renovasi *guest house* renovasi atap gedung dan pembangunan konstruksi Gedung Pendidikan PKN STAN.

3. Belanja Modal Lainnya lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya yaitu naik sebesar Rp1.624.892.656 atau 520,63% di mana realisasi tahun 2023 adalah sebesar Rp1.936.996.876 dan pada tahun sebelumnya sebesar Rp312.104.220. Kenaikan Belanja Modal Lainnya disebabkan pada tahun 2023 terdapat renovasi gedung merupakan aset milik unit eselon I lain (Aset Tetap Renovasi). Adapun tahun 2023 antara lain: renovasi gedung asrama BDK Makassar pembelian software Survey JS Basic pengadaan buku perpustakaan PKN STAN dan pembelian buku tarif kepabeanaan Indonesia. Pada tahun sebelumnya terdapat pembelian *software* Spire.Doc for Java pada Sekretariat BPPK pengadaan renovasi rumah dinas milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (jasa konsultan perencana pengawas renovasi) pada BDK Malang.
4. Belanja Modal BLU sebesar Rp4.960.871.059 dimana pada tahun sebelumnya tidak terdapat Belanja Modal BLU. Belanja Modal BLU pada tahun 2023 ini digunakan untuk pembelian peralatan laboratorium dan furniture di Gedung N dan Gedung K pekerjaan renovasi toilet gedung D *relayout* Gedung K renovasi Gedung B dan pekerjaan interior Gedung N PKN STAN.

Informasi pagu dan realisasi anggaran belanja modal tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 23 sedangkan perbandingan antara realisasi belanja modal tahun 2023 dan tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 24.

Tabel 23 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2023 dan Tahun 2022

Akun	Belanja Pegawai	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.260.439.000	26.928.867.261	98,78
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.695.958.000	24.095.970.118	90,26
5361	Belanja Modal Lainnya	2.118.153.000	1.936.996.87600	91,45
5371	Belanja Modal BLU	6.436.893.000	4.960.871.059	77,07
	Jumlah Bruto	62.511.443.000	57.922.705.314	92,66
	Pengembalian Belanja		-	
	Jumlah Neto	62.511.443.000	57.922.705.314	92,66

Tabel 24 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan Tahun 2022

Akun	Belanja Barang	Realisasi Belanja (Rp)		Naik (Turun)	
		31 Desember 2023	31 Desember 2022	Rupiah	%
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.928.867.261	10.258.697.672	16.670.169.589	162,50

Akun	Belanja Barang	Realisasi Belanja (Rp)		Naik (Turun)	
		31 Desember 2023	31 Desember 2022	Rupiah	%
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.095.970.118	45.621.027.083	(21.525.056.965)	(47,18)
5361	Belanja Modal Fisik Lainnya	1.936.996.876	312.104.220	1.624.892.656	520,63
5371	Belanja Modal BLU	4.960.871.059	-	4.960.871.059	-
	Jumlah Bruto	57.922.705.314	56.191.828.975	1.730.876.339	3,08
	Pengembalian Belanja	-	-	-	-
	Jumlah Neto	57.922.705.314	56.191.828.975	1.730.876.339	3,08

B.6.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2023 adalah sebesar Rp26.928.867.261 mengalami kenaikan sebesar Rp16.670.169.589 atau 162,50% bila dibandingkan tahun 2022. Beberapa belanja modal yang terealisasi pada tahun 2023 antara lain:

- a. Sekretariat BPPK: pengadaan kendaraan dinas jabatan pengadaan access point pengadaan kebutuhan pada *guest house* Pusdiklat Bea Cukai (berupa: pengadaan kasur meja belajar nakas *kitchen set* dan lemari pakaian) pengadaan kebutuhan untuk asrama Pusdiklat Bea Cukai pengadaan meubelair pengadaan kebutuhan untuk asrama Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan (berupa: pengadaan kasur dan meubelair) pengadaan AC (Pusdiklat Keuangan Umum dan Pusdiklat Bea Cukai) pengadaan LCD Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan pengadaan televisi (Sekretariat Badan dan Pusdiklat Bea Cukai) pengadaan *sound system* aula Gedung B Sekretariat Badan dan pengadaan peralatan elektronik untuk peningkatan asrama;
- b. PKN STAN: pengadaan furniture asrama PKN STAN pengadaan *access point* pengadaan proyektor Gedung N pengadaan alat jaringan data pengadaan sumur cadangan pengadaan peralatan fasilitas kelas Gedung N pengadaan mesin cuci asrama pengadaan alat pengukuran laboratorium pompa asrama;
- c. BDK Balikpapan: pengadaan tempat tidur dan perlengkapan asrama;
- d. BDK Makassar: pengadaan tempat tidur asrama;
- e. BDK Yogyakarta: pengadaan kebutuhan perlengkapan untuk peningkatan asrama (pengadaan AC televisi tempat tidur meja kursi lemari kamar) pengadaan perlengkapan perkantoran pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi;
- f. BDK Palembang: pengadaan meubelair berupa lemari meja kursi; dan
- g. BDK Manado: pengadaan AC dan springbed.

Adapun pada tahun 2022 terdapat realisasi berikut:

- a. Sekretariat BPPK: pengadaan kendaraan dinas pengadaan *sound system* pengadaan meubelair ruang kerja pimpinan pengadaan *water heater* asrama Pusdiklat pengadaan kursi kantor beroda di Pusdiklat pengadaan televisi asrama Pusdiklat pengadaan gorden/tirai ruangan pengadaan gorden asrama pengadaan laptop *special purpose* pengadaan karpet tangga gedung F dan pengadaan karpet aula;
- b. PKN STAN: pengadaan furnitur asrama (lemari tempat tidur dan furnitur lainnya) kursi dan meja di Gedung Pendidikan pengadaan *Air Conditioner* furnitur Gedung N peralatan dokter gigi pompa air peralatan *video editing* kursi kuliah kursi kantor pompa *submersible deepwelt grundfost* serta furnitur dan peralatan kantor; dan
- c. BDK Malang: Pengadaan Tempat Tidur (Bed Set) Asrama Pengadaan Meubelair Rumah Dinas.

Perbandingan antara realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 25 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan Tahun 2022

Akun	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Realisasi Belanja (Rp)		Naik (Turun)	
		31 Desember 2023	31 Desember 2022	Rupiah	%
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.928.867.261	10.258.697.672	16.670.169.589	162,50
	Jumlah Bruto	26.928.867.261	10.258.697.672	16.670.169.589	162,50
	Pengembalian Belanja	-	-	-	0,00
	Jumlah Neto	26.928.867.261	10.258.697.672	16.670.169.589	162,50

Mutasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 26 Mutasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023

Uraian		Nilai (Rp)
532	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.928.867.261
MUTASI :		
	Pembelian Intra	27.004.922.396
	Pembelian Ekstra	1.093.809.175
	Penyelesaian pembangunan langsung	-
	Pengembangan langsung	-
	Perolehan KDP	5.684.865
	Pengembangan KDP	-
TOTAL MUTASI ASET		28.104.416.436

Uraian		Nilai (Rp)
SELISIH		(1.175.549.175)
PENJELASAN SELISIH		
1	Pembelian Aset Peralatan dan Mesin menggunakan Belanja Barang Aset Ekstrakomptabel di beberapa satker	(1.093.809.175)
	a. Sekretariat BPPK	(328.562.820)
	b. BDK Yogyakarta	(282.744.800)
	c. BDK Makassar	(274.724.300)
	d. BDK Balikpapan	(203.330.655)
	e. PKN STAN	(4.446.600)
2	Sebelumnya terdapat transaksi Pembelian Aset Tetap Lainnya yang menggunakan akun Belanja Peralatan dan Mesin namun saat ini telah dilakukan ralat akun belanja	(81.740.000)
JUMLAH		(1.175.549.175)

B.6.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tahun 2023 dan tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp24.095.970.118 dan Rp45.621.027.083.

Adapun beberapa realisasi belanja modal tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat BPPK: pekerjaan renovasi dalam rangka peningkatan asrama lingkup BPPK pada Pusklat Bea dan Cukai dan Pusklat Anggaran dan Perbendaharaan sebesar Rp6.693.034.581;
- b. BDK Yogyakarta: pekerjaan renovasi dalam rangka peningkatan asrama sebesar Rp2.728.592.500;
- c. BDK Malang: jasa konsultasi perencanaan renovasi lanjutan asrama C tandon air asrama C dan Gedung B sebesar Rp701.787.514;
- d. BDK Balikpapan: pekerjaan renovasi dalam rangka peningkatan asrama sebesar Rp1.010.547.929;
- e. BDK Cimahi: jasa konsultan perencana pengawas dan pelaksana konstruksi renovasi gedung kelas sebesar Rp752.174.468;
- f. PKN STAN: pekerjaan jasa konsultan perencana konstruksi dan konsultan manajemen konstruksi pada pembangunan gedung asrama mahasiswa dan masjid PKN STAN pengadaan jasa konsultan perencana Gedung D PKN STAN sebesar Rp4.036.323.235;
- g. BDK Manado: paket pekerjaan konstruksi talud dan pagar sebesar Rp2.003.951.605 renovasi rumah dinas sebesar Rp196.560.762;
- h. BDK Pekanbaru: pekerjaan konstruksi gedung/bangunan pos security sebesar Rp182.500.250;

- i. BDK Denpasar : pekerjaan jasa konsultan perencanaan konstruksi dan jasa konsultan manajemen konstruksi pembangunan gedung BDK Denpasar sebesar Rp3.375.355.654.

Adapun pada tahun 2022 terdapat pengadaan sebagai berikut:

- a. Sekretariat BPPK: digunakan untuk pembayaran pengadaan pekerjaan renovasi *guest house* Pusdiklat Bea Cukai (jasa konsultan perencanaan konsultan pengawas konstruksi) sebesar Rp3.948.710.421 pengadaan pekerjaan konstruksi renovasi atap gedung C dan D Sekretariat BPPK (jasa konsultan perencanaan konsultan pengawas konstruksi) sebesar Rp2.183.857.650 pekerjaan konstruksi *sport center* Pusdiklat Pajak sebesar Rp406.830.745; dan
- b. PKN STAN: digunakan untuk penyelesaian kontrak tahun jamak pembangunan gedung pendidikan PKN STAN (perencana manajemen konstruksi dan pekerjaan konstruksi) sebesar Rp39.081.628.267.

Perbandingan antara realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 27 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dan Tahun 2022

Akun	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Realisasi Belanja (Rp)		Naik (Turun)	
		31 Desember 2023	31 Desember 2022	Rupiah	%
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.767.552.817	43.437.169.433	(25.669.616.616)	(59,10)
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	6.328.417.301	2.183.857.650	4.144.559.651	189,78
	Jumlah Bruto	24.095.970.118	45.621.027.083	(21.525.056.965)	(47,18)
	Pengembalian Belanja		-	-	-
	Jumlah Neto	24.095.970.118	45.621.027.083	(21.525.056.965)	(47,18)

Tabel 28 Mutasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023

Uraian		Nilai (Rp)
533	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.095.970.118
MUTASI :		
	Pembelian Intra	187.123.800
	Pembelian Ekstra	-
	Penyelesaian pembangunan langsung	-
	Pengembangan langsung	-
	Perolehan KDP	7.376.456.662
	Pengembangan KDP	16.056.690.625
TOTAL MUTASI ASET		23.620.271.087

Uraian		Nilai (Rp)
SELISIH		475.699.031
PENJELASAN SELISIH		
1	Kesalahan penggunaan akun belanja dan sudah dilakukan ralat akun sehingga tidak masuk sebagai transaksi mutasi belanja modal (PKN STAN)	53.776.681
2	Terdapat koreksi nilai KDP pada BDK Malang	(219.450)
3	Selisih karena BAPP Aset sudah diakui sesuai kemajuan pekerjaan sementara pembayaran baru akan dilakukan di bulan berikutnya sesuai mekanisme RPATA	
	- BDK Yogyakarta	267.637.131
	- BDK Manado	154.504.669
	JUMLAH	475.699.031

B.6.3 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya tahun 2023 dan tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.936.996.876 dan Rp312.104.220. Realisasi Belanja Modal Lainnya ini berupa:

- Sekretariat BPPK : pembelian software Survey JS Basic pembelian buku tarif kepabeanaan Indonesia;
- PKN STAN: pengadaan buku perpustakaan PKN STAN; dan
- BDK Makassar : renovasi gedung asrama (Aset Tetap Renovasi).

Adapun pada tahun sebelumnya terdapat realisasi:

- Sekretariat BPPK: pembelian *software* Spire.Doc for Java lukisan lisensi penggunaan akses poin; dan
- BDK Malang: renovasi rumah dinas milik Kanwil DJBC Jawa Timur.

Perbandingan antara realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun 2023 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 29 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun 2023 dan Tahun 2022

Akun	Belanja Modal Lainnya	Realisasi Belanja (Rp)		Naik (Turun)	
		31 Desember 2023	31 Desember 2022	Rupiah	%
536111	Belanja Modal Lainnya	1.936.996.876	312.104.220	1.624.892.656	520,63
	Jumlah Bruto	1.936.996.876	312.104.220	1.624.892.656	52,63
	Pengembalian Belanja	-	-	-	-
	Jumlah Neto	1.936.996.876	312.104.220	1.624.892.656	520,63

Tabel 30 Mutasi Belanja Modal Lainnya Tahun 2023 (Aset Tak Berwujud)

Uraian		Nilai (Rp)
Belanja Modal Lainnya		7.586.586
Mutasi:		
	Pembelian	7.586.586
	Pengembangan langsung	-
	Perolehan KDP	-
	Pengembangan KDP	-
Total Mutasi Aset		7.586.586
Selisih		-

Tabel 31 Mutasi Belanja Modal Lainnya Tahun 2023 (Aset Tetap Lainnya)

Uraian		Nilai (Rp)
Belanja Modal Lainnya		1.929.410.290
Mutasi:		
	Pembelian	179.672.674
	Pengembangan langsung	16.976.000
	Perolehan KDP	500.597.425
	Pengembangan KDP	1.150.424.191
Total Mutasi Aset		1.847.670.290
Selisih		81.740.000
Penjelasan Selisih		
Sebelumnya terdapat transaksi Pembelian Aset Tetap Lainnya yang menggunakan akun Belanja Peralatan dan Mesin namun saat ini telah dilakukan ralat akun belanja		81.740.000
JUMLAH		81.740.000

B.7 Belanja Badan Layanan Umum

Belanja Badan Layanan Umum di BPPK hanya dimiliki oleh PKN STAN. Realisasi Belanja BLU tahun 2023 dan tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp19.377.109.197 dan Rp9.466.461.365. Realisasi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp9.910.647.832 atau 104,69% dibandingkan tahun 2022. Kenaikan Belanja BLU disebabkan oleh kegiatan SPMB Reguler dilaksanakan di lebih banyak lokasi dibandingkan tahun sebelumnya jumlah kerjasama pelatihan BLU yang meningkat dan adanya realisasi Belanja Modal BLU yang digunakan untuk pembelian peralatan laboratorium dan furniture di Gedung N dan Gedung K renovasi toilet gedung D layout gedung K renovasi Gedung B dan pembayaran konsultan perencana untuk pekerjaan interior gedung N. Selain itu mulai tahun 2023 sebagian honor PPNPN dibayarkan menggunakan belanja BLU.

Perbandingan antara realisasi Belanja BLU Tahun 2023 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 32 Perbandingan Realisasi Belanja BLU Tahun 2023 dan Tahun 2022

Akun	Belanja BLU	Realisasi Belanja (Rp)		Naik (Turun)	
		31 Desember 2023	31 Desember 2022	Rupiah	%
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.519.676.500	587.993.242	931.683.258	158,45
525112	Belanja Barang	2.322.858.719	1.368.506.683	954.352.036	69,74
525113	Belanja Jasa	8.012.680.249	5.898.357.234	2.114.323.015	35,85
525115	Belanja Perjalanan	2.532.865.170	1.611.604.206	921.260.964	57,16
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	28.157.500	-	28.157.500	-
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	747.568.000	-	747.568.000	-
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	4.213.303.059	-	-	-
	Jumlah Bruto	19.377.109.197	9.466.461.365	9.910.647.832	104,69
	Pengembalian Belanja	-	-	-	-
	Jumlah Neto	19.377.109.197	9.466.461.365	9.910.647.832	104,69



C. Neraca

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**C.1 Kas Lainnya dan Setara Kas***Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0*

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1.000.000. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP kas lainnya pada bendahara pengeluaran maupun bendahara penerimaan dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

C.2 Kas Pada Badan Layanan Umum*Kas Pada Badan Layanan Umum Rp133.961.168.746*

Saldo Kas Pada Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp133.961.168.746 dan Rp135.279.623.720 mencakup seluruh kas baik saldo rekening di bank uang muka kerja maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Administrasi Keuangan BLU PKN STAN yang sumbernya berasal dari penerimaan kegiatan operasional BLU.

Rincian saldo Kas pada Badan Layanan Umum STAN per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 33 Rincian Kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2023

Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023
Kas dan Bank – BLU	4.961.168.746
Setara Kas Lainnya – BLU (Deposito)	129.000.000.000
JUMLAH	133.961.168.746

Pada tanggal neraca PKN STAN memiliki 7 (tujuh) deposito berjangka yaitu:

- Deposito berjangka 3 bulan pada Bank Mandiri dengan tanggal penempatan 31 Desember 2018 senilai Rp 16.000.000.000 dengan tingkat bunga 225% per 30 September 2023;
- Deposito berjangka 1 bulan pada Bank Mandiri dengan tanggal penempatan 31 Desember 2018 senilai Rp10.000.000.000 dengan tingkat bunga 225% per 30 September 2023;
- Deposito berjangka 3 bulan pada Bank Mandiri dengan tanggal penempatan 31 Desember 2018 senilai Rp 16.000.000.000 dengan tingkat bunga 225% per 30 September 2023;

- d. Deposito berjangka 1 bulan pada Bank BTN dengan tanggal penempatan 18 April 2022 senilai Rp5.000.000.000 dengan tingkat bunga 450% per 30 September 2023;
- e. Deposito berjangka 3 bulan pada Bank BTN dengan tanggal penempatan 18 April 2022 senilai Rp 25.000.000.000 dengan tingkat bunga 450% per 30 September 2023;
- f. Deposito berjangka 3 bulan pada Bank BTN dengan tanggal penempatan 14 April 2022 senilai Rp 10.000.000.000 dengan tingkat bunga 450% per 30 September 2023;
- g. Deposito berjangka 1 bulan pada Bank Mandiri dengan tanggal penempatan 13 Juni 2022 senilai Rp 47.000.000.000 dengan tingkat bunga 225% per 30 September 2023.

C.3 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Rp557.592.506

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp557.592.506 dan Rp97.687.500. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal neraca adalah sebagai berikut:

Tabel 34 Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2023

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Pelatihan Pajak Dasar – BPJS Ketenagakerjaan	93.371.616
2	Pendapatan Pelatihan Penilaian Tk. Lanjutan BMD – Asian Development Bank	232.000.000
3	Pendapatan Sewa Ruangan untuk ATM Gedung P	10.165.879
4	Pendapatan Bunga Deposito	122.875.000
5	Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum diterima sampai akhir tahun 2023 pada BDK Yogyakarta	75.710.308
6	Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum diterima sampai akhir tahun 2023 pada BDK Manado	23.469.703
	JUMLAH	557.592.506

C.4 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak Rp719.844.557

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp719.844.557 dan Rp510.672.860. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 35 Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023

Nama Debitur	Saldo Piutang (Rp)	Nama Satker
CV Kautsar	7.219.940	Sekretariat BPPK
Asuransi Raya	17.422.020	Sekretariat BPPK (Unit Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial)
CV Putri Mahakam Kalisamarindo	60.245.022	Politeknik Keuangan Negara STAN
CV Srikandi	411.146.280	BDK Pekanbaru
CV Sinar	14.639.598	BDK Manado
PT Nugraha Adi Taruna	180.670.410	Politeknik Keuangan Negara STAN
CV Segitiga Emas	2.792.480	Politeknik Keuangan Negara STAN
PT Sutmarindo Jaya Mandiri	6.879.120	Politeknik Keuangan Negara STAN
CV Hatrick Etaham Mandiri	1.391.000	Politeknik Keuangan Negara STAN
CV Prima Bangkit Gemilang	812.000	Politeknik Keuangan Negara STAN
CV Hatrick Etaham Mandiri	3.970.364	Politeknik Keuangan Negara STAN
PT. Sapta Buana Jaya	2.041.516	Politeknik Keuangan Negara STAN
CV Cipta Boga Vidi	2.802.875	Politeknik Keuangan Negara STAN
CV Bujangga Manik	7.811.932	BDK Cimahi
Total	719.844.557	

Penjelasan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2023 adalah berikut ini.

- a. Piutang pada BPPK Pusat dengan Debitur a.n. CV Kautsar telah diserahkan ke PUPN dengan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Nomor SP3N-24/PUPNC.10.05/2012 tanggal 07 Maret 2012. Berdasarkan Nota Dinas dari KPKNL Jakarta V nomor ND-114/WKN.07/KNL.05/2022 Debitur a.n. CV Kautsar telah diterbitkan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) sesuai dengan nomor PSBDT-157/PUPNC.10.05/2018 tanggal 27 November 2018. Piutang tersebut telah diusulkan penghapusan piutang negara secara bersyarat melalui ND-35/PP/2022 tanggal 11 Maret 2022. Biro Perencanaan dan Keuangan telah menyampaikan permohonan rekomendasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melalui S-97/MK.1/2022 tanggal 15 April 2022. Per 30 September 2023 masih menunggu hasil rekomendasi dari BPK RI.
- b. Piutang pada BPPK Pusat (Unit Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial) dengan Debitur a.n. Asuransi Raya telah diterima cicilan pada tanggal 13 Agustus 2021 dengan nilai Rp7.466.580 dengan bukti penerimaan negara NTPN F37473CIEOI49G0F. Telah dilakukan FGD Tindak Lanjut Piutang yang

Tidak Dapat Diselesaikan pada tanggal 25 Mei 2022 karena debitur sudah dilikuidasi. Kesimpulannya akan diusulkan penetapan Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO). Inspektorat Jenderal telah melakukan reviu atas piutang tersebut. Selanjutnya telah disampaikan PPNTO dari Kepala Badan kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Per 30 September 2023 perkembangan piutang tersebut masih menunggu SPTJM sebagai salah satu dasar pengusulan penghapusan secara bersyarat.

- c. Piutang pada Politeknik Keuangan Negara STAN dengan Debitur a.n. CV Putri Mahakam Kalisamarindo. Berdasarkan konfirmasi perkembangan piutang yang telah diserahkan kepada PUPN Cabang DKI Jakarta oleh KPKNL Jakarta V pada Nota Dinas Nomor ND-554/KNL.0705/2023 tanggal 18 Juli 2021 tahap pengurusan piutang debitur a.n. C.V. Putri Mahakam Kalisamarindo adalah penerbitan Surat Paksa Nomor SP-420/PUPNC.10.00/2022 tanggal 16 Desember 2022.
- d. Piutang pada BDK Pekanbaru dengan Debitur a.n. CV Srikandi telah sampai pada penyerahan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tanggal 29 Maret 2019 kepada pegawai kantor kelurahan tempat ybs berdomisili untuk ditempelkan di papan pengumuman dikarenakan ybs tidak diketahui keberadaannya. Telah dikirimkan juga surat pemberitahuan crash program pada tanggal 12 April 2021 Nomor S-641/WKN.03/KNL.03/2021 dari KPKNL ke ybs tapi tidak ada info tersampaikan atau tidak. PUPN melalui ND-330/WKN.03/KNL.03/2021 pada tanggal 11 Mei 2021 menyampaikan bahwa KPKNL Pekanbaru/PUPN Cabang Riau akan melakukan proses pengurusan Piutang Negara sampai tahapan yang paling optimal sesuai ketentuan yang berlaku. Pada Bulan Juni 2022 KPKNL Pekanbaru meminta bantuan penelitian lapangan kepada KPKNL Medan atas nama CV Srikandi yang sesuai KTP berdomisili di Medan (ND-235/KNL.0303/2022) dan ditindaklanjuti sesuai dengan penyampaian laporan pelaksanaan penelitian lapangan (ND-938/KNL.0201/2022) sesuai BAPL-481/KNL.0201/2022 diterangkan bahwa penanggung hutang tidak dikenal dan tidak ditemukan pada alamat tersebut berdasarkan keterangan dari kepala lingkungan dan pegawai kelurahan setempat. Piutang ini telah dinyatakan sebagai Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) berdasarkan surat nomor PSBDT-1/PUPNC.03.01/2024 tanggal 5 Januari 2024. Piutang tersebut telah diusulkan untuk dilakukan penghapusan piutang negara secara bersyarat melalui ND-5/PP/2022 tanggal 10 Januari 2024.

- e. Berdasarkan Nota Dinas dari BDK Manado nomor ND-1167/BPP.11/2022 Debitur a.n. CV Sinar telah diterbitkan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) sesuai dengan surat nomor PSBDT-59/PUPNC.26.01/2022 tanggal 28 November 2022. Piutang tersebut telah diusulkan untuk dilakukan penghapusan piutang negara secara bersyarat melalui ND-230/PP/2022 tanggal 25 Desember 2022 dan Biro Perencanaan dan Keuangan telah menyampaikan permohonan rekomendasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Per 30 September 2023 masih menunggu hasil rekomendasi dari BPK RI.
- f. Piutang dengan Debitur a.n. PT Nugraha Adi Taruna telah diserahkan ke PUPN dengan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Nomor SP3N-4/PUPNC.14.03/2016 tanggal 12 Oktober 2016. Berdasarkan Nota Dinas dari KPKNL Tangerang II nomor ND-255/KNL.0603/2023 tanggal 10 Maret 2023 Debitur a.n. PT Nugraha Adi Taruna telah diterbitkan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) sesuai dengan nomor PSBDT-1/PUPNC.14.03/2023 tanggal 27 Februari 2023. Piutang tersebut telah diusulkan penghapusan piutang negara secara bersyarat melalui ND-45/PP/2023 tanggal 3 April 2023. Biro Perencanaan dan Keuangan telah menyampaikan permohonan rekomendasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melalui S-151/MK.1/2023 tanggal 20 Juni 2023. Per 30 September 2023 masih menunggu hasil rekomendasi dari BPK RI.
- g. Piutang senilai Rp20.689.355 pada satuan kerja Politeknik Keuangan Negara STAN dari total 7 debitur merupakan piutang yang timbul karena temuan audit oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu dengan nomor Laporan Hasil Audit LAP-28/IJ.7/2024 tanggal 25 Maret 2024.
- h. Piutang senilai Rp7.811.932 dengan debitur CV Bujangga Manik pada satuan kerja BDK Cimahi merupakan piutang yang timbul karena temuan audit BPK tahun 2023.

C.5 Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum Rp353.337.500

Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp353.337.500 dan Rp226.007.500. Piutang dari Kegiatan Operasional BLU adalah saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum disajikan pada tabel berikut.

Tabel 36 Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum per 31 Desember 2023

No.	Nama Debitur	Saldo Piutang (Rp)
1	Mahasiswa Prodip I OC PBB	201.257.500
2	Kabupaten Timor Tengah Selatan – Mahasiswa Pembibitan	152.080.000
3	Badan Keuangan Aset dan Daerah Pemerintah Kota Bitung	0
	Jumlah	353.337.500

Terdapat Piutang dari Badan Keuangan Aset dan Daerah Pemerintah Kota Bitung pada Semester I Tahun 2023 yang merupakan piutang atas diklat Kerjasama. Piutang tersebut telah dibayar lunas pada Triwulan III Tahun 2023 dengan nilai pelunasan sebesar Rp4.950.000.

Piutang milik Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan piutang atas layanan pendidikan program pembibitan senilai Rp152.080.000- yang baru muncul pada Triwulan IV 2023. PKN STAN telah melakukan penagihan melalui S-1697/PKN/2023 tanggal 28 November 2023 tentang Penyampaian Biaya Pendidikan Kerja Sama Program Pembibitan.

C.6 Piutang dari Kegiatan Non-Operasional Badan Layanan Umum

Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum Rp286.664.703

Saldo Piutang dari Kegiatan Non-Operasional Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp286.664.703 dan Rp467.335.113. Piutang dari Kegiatan Non-Operasional Badan Layanan Umum merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang dari Kegiatan Non-Operasional Badan Layanan Umum disajikan pada tabel berikut.

Tabel 37 Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2023

No.	Nama Debitur	Saldo Piutang (Rp)
1	PT Sarana Karya Jasa	286.664.703
	Jumlah	286.664.703

Piutang dari PT Sarana Karya Jasa yang telah dikategorikan macet proses penagihannya telah dilimpahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sesuai dengan surat PUPN Nomor: SP3N-25/PUPNC.10.05/2012 tanggal 9 April 2012. Piutang ini telah dinyatakan sebagai Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) berdasarkan surat nomor PSBDT-70/PUPNC.10.05/2023 tanggal

18 Desember 2023. Piutang tersebut telah diusulkan untuk dilakukan penghapusan piutang negara secara bersyarat melalui ND-31/PP/2022 tanggal 8 Februari 2024.

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek
Rp1.180.168.379

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp1.180.168.379) dan (Rp1.423.311.893). Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitor. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek pada tanggal pelaporan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 38 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek Per 31 Desember 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk. Pendek (Rp)	% Penyisihan	Nilai Penyisihan (Rp)
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	28.501.287	0,5%	142.506
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	691.343.270	100%	691.343.270
Jumlah	719.844.557		691.485.776
Piutang Kegiatan Operasional BLU			
Lancar	152.080.000	05%	760.400
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	201.257.500	100%	201.257.500
Jumlah	353.337.500		202.017.900
Piutang Kegiatan Non Operasional BLU			
Lancar	-	05%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	286.664.703	100%	286.664.703
Jumlah	286.664.703		286.664.703
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	1.359.846.760		1.180.168.379

C.8 Persediaan

Persediaan tahun 2023
Rp3.343.125.041

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp3.343.125.041 dan Rp4.080.267.655. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan/atau untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Perbandingan rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 39 Rincian Persediaan Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Barang Konsumsi	2.722.262.876	3.391.412.353
Bahan untuk Pemeliharaan	368.528.293	314.662.114
Persediaan Lainnya	252.333.872	374.193.188
Total	Rp3.343.125.041	4.080.267.655

Tidak terdapat saldo Persediaan untuk penanganan COVID19 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Pemakaian persediaan terbesar berasal dari barang konsumsi yaitu pemakaian dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang sudah banyak diselenggarakan secara luring.

Mutasi persediaan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Mutasi Nilai Persediaan

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2022	4.080.267.655
Penambahan:	6.081.029.575
Pembelian	6.053.095.895
Reklasifikasi Masuk	27.933.680
Pengurangan:	(6.818.172.189)
Habis Pakai	(6.457.119.540)
Usang	(40.570.880)
Rusak	(85.346.576)
Reklasifikasi Keluar	(27.933.680)
Hasil Opname Fisik	(207.201.513)
Saldo per 31 Desember 2023	3.343.125.041

C.9 Tanah

Tanah tahun 2023
Rp5.872.378.852.000

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki BPPK per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 yaitu masing-masing sebesar Rp5.872.378.852.000 dan Rp5.872.378.852.000. Tidak terdapat kenaikan nilai tanah di BPPK. Selama tahun 2023 mutasi tanah di BPPK hanya berasal dari transaksi koreksi perubahan kuantitas pada Balai Diklat Kepemimpinan reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk pada BDK Pekanbaru dan BDK Yogyakarta serta transaksi koreksi pencatatan nilai pada BDK Manado.

C.10 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin
tahun 2023
Rp423.594.922.495

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp423.594.922.495 dan Rp418.329.969.501. Mutasi nilai peralatan dan mesin disajikan pada tabel berikut.

Tabel 41 Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	418.329.969.501
Mutasi tambah:	39.961.841.211
Saldo Awal	222.985.000
Pembelian	27.752.490.396
Transfer Masuk	7.204.821.698
Hibah Masuk	490.069.800
Reklasifikasi Masuk	1.450.801.120
Perolehan Lainnya	9.005.200
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	5.684.865
Koreksi Perubahan Kondisi	-
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	21.330.000
Internal Transfer Masuk	2.804.653.132
Mutasi Kurang:	(34.696.888.217)
Transfer Keluar	(6.225.414.296)
Hibah Keluar	(1.080.448.903)
Reklasifikasi Keluar	(693.173.600)
Koreksi Pencatatan	(258.286.450)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(23.634.911.836)
Internal Transfer Keluar	(2.804.653.132)
Saldo per 31 Desember 2023	423.594.922.495
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(349.491.381.836)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	74.103.540.659

Rincian Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin

Rincian mutasi tambah atas nilai Peralatan dan Mesin berasal dari saldo awal pembelian transfer masuk hibah masuk reklasifikasi masuk perolehan lainnya pengembangan nilai aset (langsung) koreksi perubahan kondisi koreksi pencatatan nilai bertambah dan internal transfer masuk.

Saldo awal peralatan dan mesin berasal dari transaksi koreksi pencatatan sehingga menjadi beberapa BMN yang terdiri dari 32 unit kelompok alat rumah tangga dan alat studio. Pembelian peralatan dan mesin di BPPK mencapai 4.898 unit yaitu kelompok alat bantu alat angkutan darat bermotor alat angkutan darat

tak bermotor alat bengkel bermesin alat bengkel tak bermesin alat pengolahan alat kantor alat rumah tangga alat studio alat komunikasi peralatan pemancar peralatan komunikasi navigasi alat kedokteran unit alat laboratorium alat khusus kepolisian komputer unit peralatan komputer dan peralatan olah raga.

Transfer masuk peralatan dan mesin sejumlah 249 unit berasal dari transaksi antar satker internal BPPK dan dari Pusintek Setjen. Transfer masuk terdiri alat angkutan darat bermotor alat kantor alat rumah tangga komputer unit dan peralatan komputer. Hibah masuk berupa 1 peralatan komputer (*virtual reality*) dari World Customs Organization (WCO) sesuai dengan BAST nomor BA-33/PP.1/2023 tanggal 6 Juli 2023 dengan nilai Rp490.069.800 yang diterima oleh Pusdiklat Bea dan Cukai. Reklasifikasi Masuk Peralatan dan Mesin atas alat kantor alat rumah tangga alat studio peralatan komputer sejumlah 122 unit, dan satu unit Solar Cell dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Perolehan lainnya terdiri dari 3 alat rumah tangga (air cleaner) karena adanya koreksi pencatatan barang pada BDK Pekanbaru. Pengembangan nilai aset langsung dilakukan terhadap 2 unit alat rumah tangga dan 2 unit alat studio senilai Rp5.684.865. Koreksi perubahan kondisi dilakukan terhadap 3.959 unit alat bantu alat angkutan darat bermotor alat angkutan darat tak bermotor alat bengkel bermesin alat bengkel tak bermesin alat ukur alat kantor alat rumah tangga alat studio alat komunikasi peralatan pemancar alat kedokteran komputer unit peralatan komputer alat SAR unit peralatan proses/produksi dan peralatan olah raga.

Koreksi pencatatan nilai bertambah terdiri dari 4 unit peralatan komputer. Internal transfer masuk peralatan dan mesin merupakan transaksi antara satker induk dengan anak satker. Terdapat 246 unit Peralatan dan Mesin yang berasal dari Internal Transfer Masuk terdiri dari alat angkutan darat bermotor alat rumah tangga alat komunikasi komputer unit dan peralatan komputer.

Rincian Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin

Rincian mutasi kurang atas nilai Peralatan dan Mesin berasal dari transfer keluar hibah keluar reklasifikasi keluar koreksi pencatatan penghentiaan aset dari penggunaan dan internal transfer keluar.

Transfer keluar peralatan dan mesin antar satker di lingkungan BPPK terdiri dari 191 unit meliputi kelompok alat angkutan darat bermotor alat kantor alat rumah tangga komputer unit dan peralatan komputer. Hibah keluar terdiri dari 471 alat angkutan darat bermotor alat bengkel tak bermesin alat kantor alat rumah tangga dan komputer unit yang diberikan kepada lembaga sosial.

Reklasifikasi keluar peralatan dan mesin atas kelompok alat pengolahan alat rumah tangga alat studio alat khusus kepolisian dan peralatan komputer sejumlah 135 unit. Koreksi pencatatan dilakukan terhadap 2 unit alat rumah tangga dan 8 unit peralatan komputer.

Penghentiaan aset dari penggunaan terdiri dari 5.164 unit kelompok alat bantu alat angkutan darat bermotor alat angkutan darat tak bermotor alat bengkel bermesin alat bengkel tak bermesin alat ukur alat kantor alat rumah tangga alat studio alat komunikasi peralatan pemancar alat kedokteran komputer unit peralatan komputer alat pelindung alat SAR unit peralatan proses/produksi dan peralatan olah raga.

Internal transfer keluar peralatan dan mesin merupakan transaksi antara satker induk dengan anak satker terdiri dari 185 unit kelompok alat angkutan darat bermotor alat rumah tangga alat komunikasi komputer unit dan peralatan komputer.

C.11 Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan tahun 2023
Rp1.271.841.746.848

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.271.841.746.848 dan Rp1.255.475.700.321. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 42 Mutasi Transaksi Gedung dan Bangunan

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	1.255.475.700.321
Mutasi tambah:	49.604.018.614
Pembelian	187.123.800
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	204.414.250
Reklasifikasi Masuk	32.801.399.816
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	582.451.410
Koreksi Perubahan Kondisi	-
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	397.232.189
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	388.401.210
Pengembangan Melalui KDP	14.626.941.489
Koreksi Manual	416.054.450
Mutasi Kurang:	(33.237.972.087)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(249.448.471)
Reklasifikasi Keluar	(32.801.399.816)
Koreksi Pencatatan	(187.123.800)

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2023	1.271.841.746.848
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(222.605.966.220)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	1.049.235.780.628

Rincian Mutasi Tambah atas Gedung dan Bangunan

Rincian mutasi tambah atas nilai Gedung dan Bangunan berasal dari pembelian penyelesaian pembangunan dengan KDP reklasifikasi masuk pengembangan nilai aset (langsung) koreksi perubahan kondisi koreksi pencatatan nilai bertambah penerimaan aset tetap renovasi, pengembangan melalui KDP dan koreksi manual. Mutasi tambah dari pembelian 1 unit bangunan gedung tempat tinggal merupakan transaksi renovasi asrama Edelweiss pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan yang salah catat sebagai pembelian (menambah NUP baru). Atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan dengan melakukan koreksi pencatatan. Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP terdiri dari 1 unit kelompok bangunan gedung tempat kerja. Reklasifikasi masuk menjadi 6 unit kelompok bangunan gedung tempat kerja dan bangunan gedung tempat tinggal. Pengembangan nilai aset (langsung) sebesar Rp582.451.410 terhadap asrama Pusdiklat Bea dan Cukai dan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Koreksi perubahan kondisi dilakukan terhadap 72 unit bangunan gedung tempat kerja bangunan gedung tempat tinggal dan tugu/tanda batas. Koreksi pencatatan nilai bertambah atas 6 unit bangunan gedung tempat tinggal senilai Rp397.232.189. Penerimaan aset tetap renovasi atas 2 unit bangunan gedung tempat kerja pada Politeknik Keuangan Negara STAN dari KPP Pratama Pondok Aren. Pengembangan melalui KDP dikeluarkan dana sebesar Rp14.626.941.489 untuk bangunan gedung tempat kerja dan bangunan gedung tempat tinggal. Koreksi manual dilakukan sehubungan dengan hasil revidu yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, sehingga dilakukan koreksi terhadap nilai gedung sebesar Rp416.054.450.

Rincian Mutasi Kurang atas Gedung dan Bangunan

Rincian mutasi kurang atas gedung dan bangunan terdiri dari transaksi koreksi pencatatan nilai berkurang reklasifikasi keluar dan koreksi pencatatan. Koreksi pencatatan nilai berkurang atas asrama pada Pusdiklat Keuangan Umum sehubungan dengan pembayaran kekurangan volume pekerjaan oleh CV. SPG atas temuan BPK. Sedangkan pada BDK Manado koreksi pencatatan nilai

berkurang disebabkan adanya kesalahan dalam pencatatan dan telah dilakukan perbaikan.

Reklasifikasi keluar terdiri atas 6 unit kelompok bangunan gedung tempat kerja dan bangunan gedung tempat tinggal. Koreksi pencatatan dilakukan terhadap 1 unit bangunan gedung tempat tinggal pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan.

C.12 Jalan Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2023 Rp0

Saldo Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi nilai Jalan Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 43 Mutasi Aset Tetap Lainnya

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	-
Mutasi tambah:	839.367.520
Transfer Masuk	839.367.520
Mutasi Kurang:	-
Reklasifikasi Keluar	-839.367.520
Saldo per 31 Desember 2023	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	0
Nilai Buku per 31 Desember 2023	0

Rincian Mutasi Tambah atas Jalan Irigasi dan Jaringan

Rincian penambahan Jalan Irigasi dan Jaringan berasal dari transfer masuk 1 unit instalasi pembangkit listrik yang berasal dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan nota dinas persetujuan pengalihan nomor ND-663/MK.1/SJ.7/2023 tanggal 7 Desember 2023. Selanjutnya atas aset jaringan tersebut dilakukan Reklasifikasi Keluar ke aset Peralatan dan Mesin sehingga saldo Jalan Irigasi dan Jaringan pada 31 Desember 2023 menjadi nihil.

C.13 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya tahun 2023 Rp9.982.747.879

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah peralatan dan mesin gedung dan bangunan jalan irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp9.982.747.879 dan Rp10.007.325.080.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 44 Mutasi Aset Tetap Lainnya

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	10.007.325.080
Mutasi tambah:	1.930.910.250
Pembelian	196.648.674
Transfer Masuk	1.499.960
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1.651.021.616
Reklasifikasi Masuk	81.740.000
Mutasi Kurang:	(1.955.487.451)
Transfer Keluar	(1.652.521.576)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(302.965.875)
Saldo per 31 Desember 2023	9.982.747.879
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(382.658.950)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	9.600.088.929

Rincian Mutasi Tambah atas Aset Tetap Lainnya

Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya berasal dari pembelian transfer masuk penyelesaian pembangunan dengan KDP reklasifikasi masuk dan koreksi perubahan kondisi.

Pembelian 480 unit kelompok bahan perpustakaan tercetak. Adapun transaksi transfer keluar/transfer masuk merupakan transaksi antar satker di BPPK yaitu transfer 1 unit lukisan dan ukiran dari Sekretariat BPPK (Pusdiklat KM) ke PKN STAN. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP atas Aset Tetap Lainnya dalam Renovasi (1 unit Gedung dan Bangunan) pada BDK Makassar dan telah diserahkan melalui transfer keluar ke Kantor Pengelolaan TIK dan BMN Makassar. Sedangkan untuk reklasifikasi masuk berasal 13 unit kelompok barang bercorak kesenian (alat musik) pada BDK Palembang. Koreksi perubahan kondisi dilakukan terhadap 1.019 unit kelompok bahan perpustakaan tercetak dan barang bercorak kesenian.

Penghentian Aset dari Penggunaan dilakukan terhadap 1.401 unit kelompok bahan perpustakaan tercetak bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro kartografi naskah dan lukisan serta barang bercorak kesenian. Adapun daftar BMN Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2023
Rp12.315.575.728

C.14 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp12.315.575.728 dan Rp29.375.500 yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Tabel 45 Mutasi Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	29.375.500
Mutasi tambah:	29.680.474.853
Perolehan/Penambahan KDP	1.235.127.403
Pengembangan KDP	27.479.892.949
Koreksi Nilai KDP Bertambah	537.336.364
Perolehan Lainnya KDP	352.118.137
Reklasifikasi Masuk KDP	76.000.000
Mutasi Kurang:	(17.394.274.625)
Reklasifikasi Keluar KDP	(76.000.000)
Koreksi Pencatatan KDP	(428.663.625)
Koreksi Nilai KDP Berkurang	(407.233.645)
Menjadi Aset Definitif	(16.482.377.355)
Saldo per 31 Desember 2023	12.315.575.728

Selama tahun 2023 terdapat penambahan KDP yang berasal dari perolehan/penambahan KDP pengembangan KDP koreksi nilai KDP bertambah perolehan lainnya KDP dan reklasifikasi masuk KDP. Sedangkan pengurangan nilai KDP berasal dari Reklasifikasi Keluar KDP koreksi pencatatan KDP koreksi nilai KDP berkurang serta menjadi aset definitif.

Per 31 Desember 2023 masih terdapat saldo KDP sebesar Rp12.315.575.728 yang masih dalam proses penyelesaian pembangunannya.

Rincian saldo KDP pada masing-masing satker adalah sebagai berikut:

Tabel 46 Rincian Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan

Satker	Saldo KDP (Rp)	Keterangan
PKN STAN	4.089.829.065	Pembangunan asrama dan fasilitas pendukung (<i>multiyears</i> 2023-2024)
BDK Yogyakarta	2.642.020.543	Pekerjaan renovasi asrama (kontruksi dan perencanaan)
BDK Balikpapan	85.468.719	Perencanaan Renovasi Transit Office dan Hunian Sementara Kementerian Keuangan Daerah Penyangga Ibukota Negara

BDK Manado	1.963.208.003	Pembangunan talud dan pagar yang belum selesai s.d akhir tahun.
BDK Denpasar	3.535.049.398	Konsultan perencanaan dan Manajemen Konstruksi pembangunan gedung BDK (multiyears 2023-2024)
Jumlah	12.315.575.728	

C.15 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap tahun 2023
Rp(572.480.007.006)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp(572.480.007.006) dan Rp(524.289.838.770).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Tabel 47 Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No.	Rincian	Nilai per 31 Desember 2023 (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku Setelah Penyusutan (Rp)
1	Tanah	5.872.378.852.000	-	5.872.378.852.000
2	Peralatan dan Mesin	423.594.922.495	(349.491.381.836)	74.103.540.659
3	Gedung dan Bangunan	1.271.841.746.848	(222.605.966.220)	1.049.235.780.628
4	Jalan irigasi dan Jaringan	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	9.982.747.879	(382.658.950)	9.600.088.929
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	12.315.575.728	-	12.315.575.728
	Jumlah	7.590.113.844.950	(572.480.007.006)	7.017.633.837.944

C.16 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
Rp1.502.085.261

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.502.085.261 dan Rp1.515.243.043. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Adapun Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 48 Rincian Piutang Tagihan Tuntutan TP/TGR 31 Desember 2023

No.	Nama	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Status/Kualitas Piutang
1	Hartadi Sutomo	63.900.000	Macet
2	Petrus P. S. Depari	1.364.510.913	Macet
3	Setyo Utomo	34.654.546	Macet
4	Ryandi Aditya	21.000.000	Macet
5	Dwi Wulandari	18.019.802	Macet
6	Astriani Saputri	0	Lunas
7	Ferry Irawan	0	Lunas
8	Nur Fitria Ningsih	0	Lunas
9	Nur Tri Wibowo	0	Lunas
	Total	1.502.085.261	

Kenaikan nilai TGR tersebut disebabkan karena adanya penyesuaian nilai kurs atas nama Petrus P.S. Depari. Penjelasan atas masing-masing piutang TGR adalah sebagai berikut:

1. Hartadi Sutomo nilai TGR Rp72.000.000 telah dilakukan angsuran Rp8.100.000 kasus terkait dengan kehilangan kendaraan dinas roda empat. Proses penagihannya telah dilimpahkan ke DJKN sesuai surat nomor S-697/MK.1/2008 tanggal 31 Desember 2008. Status terakhir pada KPKNL Jakarta V adalah tahap Laporan Pemberitahuan Surat Paksa Nomor Lap-61/WKN.07/KNL.05.04/2016 tanggal 24 Oktober 2016. Piutang ini telah dinyatakan sebagai Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) berdasarkan surat nomor PSBDT-69/PUPNC.10.05/2023 tanggal 18 Desember 2023.
2. Petrus Pujanta Sembiring Depari nilai TGR Rp36.778.836 dan \$85.998,58 terkait dengan pegawai ikatan dinas yang tidak melaksanakan tugas. Proses penagihannya telah dilimpahkan ke DJKN sesuai surat nomor S-241/MK.1/2013 tanggal 28 Maret 2013. PUPN Cabang Sumatera Selatan telah menerima penyerahan pengurusan piutang tersebut sesuai surat Nomor SP3N-2015/PUPNC.05.01/2013 tanggal 30 September 2013. Hasil Konfirmasi dari KPKNL Palembang melalui Nota Dinas Nomor ND-665/KNL.0402/2023 tanggal 20 Juli 2023 bahwa per 30 September 2023 KPKNL Palembang masih menunggu hasil pepadanan NIK lama dengan NIK baru yang telah diajukan ke Ditjen Dukcapil Kemendagri melalui Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara DJKN untuk pengajuan usulan pencegahan ke luar negeri

kepada Direktorat Jenderal Imigrasi. Surat Paksa belum dapat disampaikan karena debitur tidak dapat ditemukan berdasarkan data-data yang ada. Perkembangan terakhir berdasarkan konfirmasi dari KPKNL Palembang melalui Nota Dinas Nomor ND-64/KNL.0402/2024 tanggal 11 Januari 2024 diperoleh data keberadaan debitur di Kota Depok namun setelah dilakukan penelitian lapangan oleh KPKNL Bogor (BAPL-1/KNL.080803/2023 tanggal 14 Desember 2023) debitur tidak ditemukan dan tidak dikenal di alamat tersebut.

3. Setyo Utomo nilai TGR Rp35.200.000 telah dilakukan angsuran Rp545.454 terkait dengan kehilangan kendaraan dinas roda empat. Proses penagihannya telah dilimpahkan ke DJKN sesuai surat nomor S-310/MK.1/2010 tanggal 24 Mei 2010. PUPN Cabang Jawa Timur telah menerima penyerahan pengurusan piutang tersebut sesuai surat Nomor SP3N-374/PUPNC.18.03/2010 tanggal 23 Agustus 2010. Status terakhir pada KPKNL Malang adalah tahap Laporan Pemberitahuan Surat Paksa Nomor Lap-08/WKN.10/KNL.03/2012 tanggal 19 Maret 2012 sehingga sisa Kerugian Negara sebesar Rp34.654.546.
4. Ryandi Aditya nilai TGR Rp21.000.000 terkait dengan pelanggaran kontrak kerja/ikatan dinas. Proses penagihannya telah dilimpahkan ke DJKN sesuai surat nomor S-265/MK.1/2019 tanggal 11 September 2019. PUPN Cabang Riau telah menerima penyerahan pengurusan piutang tersebut sesuai surat Nomor SP3N-28/PUPNC.0301/2019 tanggal 23 September 2019. PUPN Cabang Riau telah menyatakan piutang tersebut sebagai Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) melalui surat Nomor PSBDT-21/PUNC.03.01/2022 tanggal 21 Juni 2022. Selanjutnya piutang tersebut telah diusulkan penghapusan piutang negara secara bersyarat kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan melalui surat Nomor ND-145/PP/2022 tanggal 22 Agustus 2022.
5. Dwi Wulandari nilai TGR Rp20.000.000 terkait dengan pelanggaran kontrak kerja/ikatan dinas. Proses penagihannya telah dilimpahkan ke DJKN sesuai surat nomor S-149/MK.1/2019 tanggal 21 Juni 2019. PUPN Cabang DKI Jakarta telah menerima penyerahan pengurusan piutang tersebut sesuai surat Nomor SP3N-441/PUPNC.10.05/2019 tanggal 9 Agustus 2019. Cicilan Pertama sebesar Rp1.980.198 telah diterima pada tanggal 10 Maret 2021. Sehingga sisa Kerugian Negara sebesar Rp18.019.802.
6. Astriani Saputri nilai TGR Rp5.500.000 terkait dengan pelanggaran kontrak kerja/ikatan dinas sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Sdri. Astriani Saputri tanggal 20 Februari 2023. Kerugian negara tersebut sudah dilunasi sekaligus dan dibuktikan melalui Surat Keterangan

Lunas (SKTL) Nomor KET-29/PP.6/2023 tanggal 20 Februari 2023 sehingga status piutang sudah lunas.

7. Ferry Irawan nilai TGR Rp4.750.000 terkait dengan pelanggaran kontrak kerja/ikatan dinas sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Sdr. Ferry Irawan tanggal 11 Mei 2023. Kerugian negara tersebut sudah dilunasi sekaligus dan dibuktikan melalui Surat Keterangan Lunas (SKTL) Nomor KET-225/PKN/2023 tanggal 12 Mei 2023 sehingga status piutang sudah lunas.
8. Nur Fitria Ningsih nilai TGR Rp29.000.000 terkait dengan pelanggaran kontrak kerja/ikatan dinas sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Sdr. Nur Fitria Ningsih tanggal 30 Agustus 2023. Kerugian negara tersebut sudah dilunasi sekaligus dan dibuktikan melalui Surat Keterangan Lunas (SKTL) Nomor KET-80/BPP.01/2023 tanggal 1 September 2023 sehingga status piutang sudah lunas.
9. Nur Tri Wibowo nilai TGR Rp51.620.000 terkait dengan pelanggaran kontrak kerja/ikatan dinas sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Sdr. Nur Tri Wibowo tanggal 11 September 2023. Kerugian negara tersebut sudah dilunasi sekaligus dan dibuktikan melalui Surat Keterangan Lunas (SKTL) Nomor KET-391/PKN/2023 tanggal 27 September 2023 sehingga status piutang sudah lunas.

C.17 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – TP/TGR

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
TP/TGR
(Rp1.502.085.261)

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – TP/TGR per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp1.502.085.261) dan (Rp1.515.243.043). Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang TP/TGR merupakan estimasi atas ketidaktertagihan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TPA.

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – TP/TGR pada tanggal pelaporan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 49 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – TP/TGR

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang (Rp)	% Penyisihan	Nilai Penyisihan (Rp)
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	1.502.085.261	100%	1.502.085.261
Total	1.502.085.261		1.502.085.261

Piutang Jangka Panjang Lainnya
Rp925.823.061

C.18 Piutang Jangka Panjang Lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp925.823.061 dan Rp925.823.061. Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah piutang lainnya yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun. Rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 50 Rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya 31 Desember 2023

No	Nama	31 Desember 2023 (Rp)	Kualitas Piutang
1	PT Handa Panca Sakti	925.823.061	Macet
	Total	925.823.061	

Saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya a.n. PT Handa Panca Sakti merupakan hasil temuan dari Pemeriksaan oleh BRK-RI Tahun Anggaran 2018 No. 65.c/LHP/XV/04/2020 tanggal 26 April 2020 pada Satuan Kerja Pusdiklat PSDM untuk pelaksanaan kegiatan Latsar Tahun Anggaran 2018. Pada tahun 2022 telah dilakukan penagihan pertama sampai ketiga (10 April 2022) sehingga kualitas piutang saat ini adalah macet. Selanjutnya piutang tersebut telah dilimpahkan pengurusannya melalui Nota Dinas Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan nomor ND-172/PP/2022 tanggal 22 September 2022 dan telah diterima oleh PUPN Cabang DKI Jakarta melalui surat nomor SP3N-416/PUPNC.10.05/2022 tanggal 18 November 2022. Panggilan telah dilakukan oleh PUPN Cabang DKI Jakarta melalui S-3397/KNL.0705/2022 tanggal 21 November 2022.

C.19 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya
Rp925.823.061

Saldo Penyisihan Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp925.823.061) dan (Rp925.823.061). Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Panjang Lainnya yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TPA. Rincian

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya pada tanggal pelaporan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 51 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya (Rp)	% Penyisihan	Nilai Penyisihan (Rp)
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	925.823.061	100%	925.823.061
Total	925.823.061		925.823.061

C.20 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud tahun 2023
Rp10.022.176.354

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp10.022.176.354 dan Rp10.231.219.768. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi tambah aset tak berwujud berupa pembelian 1 unit software komputer sebesar Rp7.586.586 sedangkan mutasi kurang berasal dari penghentian aset dari penggunaan sejumlah 39 unit software komputer dan 1 lisensi sebesar Rp216.630.000.

Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 52 Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Software	8.951.747.884
2	Lisensi	186.444.400
3	Aset Tak Berwujud Lainnya	883.984.070
Saldo per 31 Desember 2023		10.022.176.354
Akumulasi amortisasi per 31 Desember 2023		(7.074.888.153)
Nilai Buku per 31 Desember 2023		2.947.288.201

C.21 Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang dibatasi penggunaannya tahun 2023
Rp1.508.925.644

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.508.925.644 dan Rp0. Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya digunakan untuk mencatat Dana di Rekening Penampungan - Kementerian/Lembaga berasal dari penggunaan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) pada saat prestasi pekerjaan belum diterima dimana pencairan dana ditampung ke dalam rekening

penampungan terlebih dahulu. Pembayaran/pencairan dana kepada penyedia barang / jasa akan dilakukan setelah prestasi pekerjaan diterima.

Mutasi atas Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No	Satker	Saldo Awal 1 Januari 2023	Pembayaran Pekerjaan	Saldo Akhir 31 Desember 2023	Tingkat penyelesaian Pekerjaan 31 Desember 2023
1	PKN STAN	-	-	97.794.330	Selesai
2	BDK Yogyakarta	-	-	601.912.675	Belum selesai
3	BDK Manado	-	-	500.987.901	Belum selesai
4	BDK Denpasar	-	-	308.230.738	Selesai
	Jumlah	-	-	1.508.925.644	

C.22 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain tahun 2023
Rp12.109.451.354

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp12.109.451.354 dan Rp15.047.191.782. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BPPK serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Saldo Aset Lain-lain seluruhnya berasal dari Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan.

Uraian mutasi Aset Lain-lain dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 53 Mutasi Nilai Aset Lain-lain

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	15.047.191.782
Mutasi tambah:	24.154.507.711
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	24.154.507.711
Mutasi Kurang:	(27.092.248.139)
Penghapusan	(1.065.618.815)
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(26.026.629.324)
Saldo per 31 Desember 2023	12.109.451.354
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(11.692.227.831)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	417.223.523

Mutasi tambah aset lain-lain berasal dari reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya dengan jumlah 6.605 unit yang terdiri dari kelompok alat bantu alat angkutan darat bermotor alat angkutan darat tak bermotor alat bengkel bermesin alat bengkel tak bermesin alat ukur alat kantor alat rumah tangga alat studio alat komunikasi peralatan pemancar alat kedokteran komputer unit peralatan komputer

alat pelindung alat SAR unit peralatan proses/produksi peralatan olah raga bahan perpustakaan tercetak bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro kartografi naskah dan lukisan barang bercorak kesenian dan aset tak berwujud.

Mutasi kurang berasal dari penghapusan dan pencatatan barang yang mau dihapuskan.

C.23 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya tahun 2023
Rp18.767.115.984*

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp18.767.115.984 dan Rp18.305.852.109. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 54 Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

No.	Rincian	Nilai Perolehan (Rp)	Akm. Penyusutan/Amortisasi (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	10.022.176.354	(7.074.888.153)	2.947.288.201
2	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	1.508.925.644	-	1.508.925.644
3	Aset Lainnya	12.109.451.354	(11.692.227.831)	417.223.523
	Jumlah	23.640.553.352	(18.767.115.984)	4.873.437.368

C.24 Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada Pihak
Ketiga tahun 2023
Rp2.538.012.380*

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp2.538.012.380 dan Rp1.110.932.258. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan akan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang kepada Pihak Ketiga terdiri dari kekurangan belanja yang belum dibayar prestasi pekerjaan yang telah selesai tetapi belum dilakukan pembayaran baik yang berasal dari kontrak maupun perolehan barang/jasa dan utang kepada pihak ketiga lainnya. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga disajikan pada tabel berikut.

Tabel 55 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Keterangan
Belanja barang yang masih harus dibayar	1.451.228.736	Tagihan listrik air telepon bulan Desember 2023
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	1.086.783.644	Kemanjuan pekerjaan RPATA sesuai BAPP

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Keterangan
Jumlah	2.538.012.380	

C.25 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka tahun 2023 Rp321.001.531

Nilai Pendapatan pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp321.001.531 dan Rp158.752.577. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima/disetor ke kas Negara namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga. Rincian pendapatan diterima dimuka disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 56 Rincian Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Keterangan
Pendapatan Sewa Diterima di Muka	67.534.864	Sewa lokasi ATM kantin Sekretariat BPPK dan Pusdiklat KU
Pendapatan Diterima di Muka BLU	253.466.667	Biaya pendidikan Program Pembibitan - Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali) – PKN STAN
Jumlah	321.001.531	

C.26 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN tahun 2023 Rp0

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.27 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya tahun 2023 Rp0

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

C.28 Ekuitas

Ekuitas tahun 2023 Rp7.157.689.826.074

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp7.157.689.826.074 dan Rp7.177.140.299.363. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas berupa selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas dapat dilihat pada huruf E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.



D. Laporan Operasional

Catatan atas Laporan Keuangan

Pos Laporan Operasional

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBPN
tahun 2023
Rp21.112.420.317

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp21.112.420.317 dan Rp 15.617.827.810. Perbandingan rincian PNBP tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 57 Perbandingan Rincian PNBP 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Akun	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	% Naik (Turun)
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	4.753.703.757	4.864.002.500	(2,27)
424313	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	4.297.724.068	2.855.915.000	50,49
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	3.918.003.479	3.113.762.648	25,83
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	3.253.276.947	1.371.948.000	137,13
424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	847.800.000	-	-
424215	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang	445.875.000	-	-
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	435.619.434	77.137.392	464,73
424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	387.344.000	118.160.000	227,81
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	7.001.721	-	-
424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	3.800.000	1.000.000	280,00
425289	Pendapatan Pengujian Sertifikasi Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya	1.891.000.000	1.211.000.000	56,15
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	443.200.000	556.800.000	(204,0)
425131	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	162.154.258	172.168.014	(5,82)
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	206.429.213	367.588.756	(43,84)
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	30.012.840	-	-
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	29.475.600	5.845.500	404,24
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	-	902.500.000	(100,00)
	JUMLAH	21.112.420.317	15.617.827.810	35,18

Pendapatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU) di BPPK terdiri dari Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha – Uang Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung Pendapatan Lain-lain BLU dan Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin. Selama TA 2023 pendapatan terbesar BLU berasal dari jasa layanan pendidikan berupa pendaftaran SPMB kerjasama dengan PUPR kerjasama dengan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste termasuk layanan terjemaha ijazah dengan total sebesar Rp4.753.703.757.

Pendapatan PNBP Lainnya terdiri dari Pendapatan Pengujian Sertifikasi Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya Pendapatan Pendidikan Lainnya Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah Pendapatan Anggaran Lain-lain dan Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya. Pendapatan PNBP Lainnya terbesar berasal dari biaya pendaftaran sertifikasi ahli kepabeanaan pada Pusdiklat Bea dan Cukai sebesar Rp1.891.000.000 atau naik 56,15% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai tahun
2023
Rp11.037.342.900

Jumlah Beban Pegawai untuk periode periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp11.037.342.900 dan Rp52.276.995.464. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan aturan undang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan kapitalisasi.

Tabel 58 Perbandingan Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Akun	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	% Naik (Turun)
511129	Beban Uang Makan PNS	9.323.113.400	10.382.150.550	(10,20)
525111	Beban Gaji dan Tunjangan	1.519.676.500	587.993.242	158,45
512211	Beban Uang Lembur	194.553.000	48.661.000	299,81
511111	Beban Gaji Pokok PNS	-	31.877.383.660	(100,00)
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	-	2.409.495.000	(100,00)
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-	2.338.896.840	(100,00)
511126	Beban Tunj. Beras PNS	-	1.837.428.300	(100,00)
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	-	994.205.000	(100,00)
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	-	984.100.000	(100,00)
511122	Beban Tunj. Anak PNS	-	691.565.808	(100,00)
511125	Beban Tunj. PPh PNS	-	124.646.531	(100,00)
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	-	469.533	(100,00)
	Jumlah	11.037.342.900	52.276.995.464	(78,89)

Sampai dengan 31 Desember 2023 Beban Pegawai mengalami penurunan sampai dengan 78,89% bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena pembayaran gaji dengan menggunakan

DIPA BPPK dilakukan sampai dengan pembayaran gaji bulan Juni 2022. Selanjutnya mulai bulan Juli 2022 pembayaran gaji induk sudah menggunakan DIPA Sekretariat Jenderal sehubungan dengan sentralisasi pembayaran gaji di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 107/KMK.01/2022 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 249/KMK.01/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan nomor 107/KMK.01/2022 tentang Pelaksanaan Sentralisasi Pembayaran Gaji Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan. Adapun untuk pembayaran uang makan dan lembur masih menggunakan DIPA BPPK.

Beban pegawai berasal dari Beban Uang Makan PNS Beban Gaji dan Tunjangan dan Beban Uang Lembur. Beban Uang Makan PNS mengalami penurunan sehubungan dengan adanya mutasi pegawai serta pelaksanaan tugas diluar kantor sehingga tidak dibayarkan uang makan. Adapun kenaikan Beban Gaji dan Tunjangan dikarenakan pembayaran honorarium sebagian PPNPN petugas administrasi BLU yang semula dibayarkan menggunakan rupiah murni menjadi dibayarkan menggunakan Belanja Barang BLU. Kemudian untuk pembayaran uang lembur mengalami kenaikan sampai dengan 299% dikarenakan pembayaran honor piket (tidak menggunakan belanja barang).

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan
tahun 2023
Rp6.224.486.564

Jumlah Beban Persediaan untuk periode periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp6.224.486.564 dan Rp6.370.188.376. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 59 Perbandingan Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian		31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	% Naik (Turun)
593111	Beban Persediaan konsumsi	5.729.927.404	5.265.339.096	8,82
593149	Beban persediaan lainnya	494.559.160	1.104.849.280	(55,24)
	Jumlah	6.224.486.564	6.370.188.376	(2,29)

Beban persediaan berasal dari persediaan konsumsi dan persediaan lainnya. Beban persediaan mengalami penurunan sebesar Rp145.701.812 atau turun 2,29% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penurunan beban persediaan tersebut karena tidak diselenggarakannya diklat kesamaptaaan di beberapa satker. Diklat tersebut membutuhkan persediaan yang cukup banyak selain itu waktu penyelenggaraannya juga cukup lama kurang lebih 1 bulan waktu pelaksanaan. Beban persediaan terbesar berasal dari penggunaan alat tulis kantor lainnya dan alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya.

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan
Jasa tahun 2023
Rp292.370.472.835

Beban Barang dan jasa untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp292.370.472.835 dan Rp235.530.520.780. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 60 Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Akun	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	% Naik (Turun)
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	122.776.790.582	103.019.268.124	19,18
521211	Beban Bahan	46.297.448.559	26.933.536.988	71,90
521111	Beban Keperluan Perkantoran	37.229.389.274	38.040.441.803	(2,13)
522151	Beban Jasa Profesi	27.772.605.319	23.451.130.411	18,43
522191	Beban Jasa Lainnya	18.806.833.804	11.046.652.360	70,25
522111	Beban Langganan Listrik	16.120.734.073	12.270.724.672	31,38
525113	Beban Jasa	8.012.680.249	5.898.357.234	35,85
522141	Beban Sewa	4.579.641.684	3.902.688.487	17,35
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	3.563.812.072	2.818.626.939	26,44
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	2.356.986.785	2.676.556.260	(11,94)
525112	Beban Barang	2.322.858.719	1.368.506.683	69,74
521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1.094.529.175	2.254.300	48.452,95
522113	Beban Langganan Air	604.555.039	465.435.651	29,89
522131	Beban Jasa Konsultan	267.056.000	126.257.644	111,52
521213	Beban Honor Output Kegiatan	191.125.000	784.040.000	(75,62)
522112	Beban Langganan Telepon	105.409.766	100.162.930	5,24
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	95.725.548	105.615.108	(9,36)
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	82.479.884	-	-
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	58.303.803	1.905.636.920	(96,94)
525119	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	28.157.500	-	-
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2.110.000	116.797.882	(98,19)
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1.240.000	-	-

Akun	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	% Naik (Turun)
521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	497.830.384	(100,00)
	Jumlah	292.370.472.835	235.530.520.780	24,13

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 adalah Rp 292.370.472.835 mengalami kenaikan 24,13% atau Rp 56.839.952.055 bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Beban Barang dan Jasa terbesar berasal dari Belanja Barang Non Operasional Lainnya yang berasal dari pembayaran allowance beasiswa uang saku KKM akomodasi pelatihan honorarium penguji/pelatih serta untuk pembayaran pelaksanaan kegiatan lainnya dalam rangka pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh BPPK.

Beban yang terkait penanganan pandemi COVID19 per 31 Desember 2023 adalah Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 Rp58.303.803 dan Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 Rp2.110.000.

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan tahun 2023 Rp28.118.624.417

Beban pemeliharaan untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp28.118.624.417 dan Rp23.877.384.847. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 61 Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Akun	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	% Naik (Turun)
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.619.577.148	17.308.440.578	19,13
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.011.073.365	5.771.724.188	21,47
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	487.973.904	618.934.320	(21,16)
523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	-	178.285.761	(100,00)
	Jumlah	28.118.624.417	23.877.384.847	17,76

Beban Pemeliharaan berasal dari perbaikan dan pemeliharaan BMN di lingkungan BPPK agar aset yang dimiliki dapat digunakan sebagaimana mestinya. Beban pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp4.241.239.570 atau 17,76% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

D.6 Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan
Dinas tahun 2023
Rp25.971.670.775*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp25.971.670.775 dan Rp15.549.924.054. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi atas pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 62 Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Akun	Uraian Jenis Beban	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	% Naik (Turun)
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	14.602.411.082	11.773.173.846	24,03
524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	5.215.593.497	167.822.710	3.007,80
525115	Beban Perjalanan	2.532.865.170	1.611.604.206	57,16
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.041.926.323	1.497.601.492	36,35
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	858.443.500	499.721.800	71,78
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	720.431.203	-	-
	Jumlah	25.971.670.775	15.549.924.054	67,02

Beban Perjalanan Dinas mengalami kenaikan Rp10.421.746.721 atau mencapai 67,02% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Beban Perjalanan Dinas tersebut meliputi perjalanan dinas dalam rangka mutasi pelaksanaan pelatihan dasar CPNS pelatihan regular perjadi dalam rangka produksi dokumen pengetahuan dan pelaksanaan kegiatan lainnya di lingkungan BPPK.

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat tahun
2023 Rp0*

Tidak terdapat Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat baik pada tahun 2023 maupun 2022. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial tahun 2023 Rp0

Tidak terdapat Beban Bantuan Sosial baik pada tahun 2023 maupun 2022. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif.

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2023 Rp74.581.544.266

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp74.581.544.266 dan Rp77.900.686.852. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Amortisasi mulai diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan 2016. Beban penyusutan dilakukan secara sistematis oleh aplikasi SAKTI pada modul Aset. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 63 Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Akun	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	% Naik (Turun)
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	36.751.935.488	40.568.431.784	(9,41)
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	35.882.560.464	35.153.920.455	2,07
592115	Beban Amortisasi Software	1.843.436.608	1.885.362.726	(2,22)
591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	48.409.375	63.326.038	(23,56)
592116	Beban Amortisasi Lisensi	28.104.440	36.985.020	(24,01)
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	27.097.891	27.000.731	0,36
591313	Beban Penyusutan Jaringan	10.492.094	44.112.533	(76,22)
591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	20.092.880	(100,00)
591312	Beban Penyusutan Irigasi	-	101.454.685	(100,00)
	Jumlah	74.592.036.360	77.900.686.852	(4,25)

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih tahun 2023 (Rp12.378.625)

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar (Rp12.378.625) dan Rp 947.055.455. Rincian Beban

Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 64 Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Akun	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Naik (Turun) %
594612	Beban Penyisihan Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	636.650	123.750	414,46
594211	Beban Penyisihan Piutang PNPB	-	(57.538.362)	(100,00)
594991	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya	-	921.193.946	(100,00)
594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	142.507	-	-
594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	(13.157.782)	83.276.121	(115,80)
	Jumlah	(12.378.625)	947.055.455	(101,31)

Sampai dengan akhir tahun 2023 terdapat pembayaran sebagian piutang pada PKN STAN serta ada tambahan penyisihan piutang BLU sehingga Beban Penyisihan Piutang BLU Pelayanan Pendidikan menjadi sebesar Rp636.650. Selain itu terdapat penyesuaian kurs piutang TGR atas nama Petrus P.S Depari yang masuk dalam Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi.

D.11 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional

Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2023 Rp170.591.544

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar (Rp170.591.544) dan Rp407.651.828. Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non-Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non-Operasional untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 65 Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non-Operasional
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	% Naik (Turun)
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(150.357.972)	56.551.845	(365,88)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	1.898.388.733	518.595.152	266,06
Beban Pelepasan Aset non Lancar	2.048.746.705	462.043.307	343,41
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(20.233.572)	351.099.983	(105,76)

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	% Naik (Turun)
Pendapatan dari Kegiatan non Operasional Lainnya	160.722.974	363.053.786	(55,73)
Beban dari Kegiatan non Operasional Lainnya	180.956.546	11.953.803	1.413,80
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan non Operasional	(170.591.544)	407.651.828	(141,85)

Pendapatan pelepasan Aset Non Lancar berasal dari Penjualan Peralatan dan Mesin dan Pemindahtanganan BMN Lainnya masing-masing sebesar Rp1.635.600.165 dan Rp262.788.568. Sedangkan Beban Pelpasan aset non lancar berasal dari kerugian pelepasan aset (nilai buku aset).

Adapun Pendapatan dari Kegiatan non Operasional Lainnya berasal dari pembayaran TGR ikatan dinas pengembalian belanja TAYL dan penyesuaian kurs. Beban dari Kegiatan non Operasional Lainnya berasal dari beban persediaan rusak/usang serta penyesuaian nilai kurs atas piutang TGR.



E. Laporan Perubahan Ekuitas

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal

Rp7.177.140.299.363

Nilai ekuitas awal pada tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp7.177.140.299.363 dan Rp7.159.222.210.647.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO

(Rp417.349.934.359)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar (Rp417.349.934.359) dan (Rp396.427.276.190). Surplus (Defisit) LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional surplus/defisit kegiatan non operasional sampai dengan pos luar biasa.

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Dampak Kumulatif

Perubahan Kebijakan Akuntansi Rp0

Tidak terdapat Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

E.4 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai

Aset Rp0

Tidak terdapat Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp48.139.415

Jumlah Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp48.139.415 dan Rp0. Koreksi nilai persediaan tersebut berasal dari koreksi pencatatan persediaan pada satker BDK Cimahi sebagai tindak lanjut hasil rekomendasi temuan BPK RI pada Laporan Keuangan Tahun 2022.

E.4.3 Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas

Reklasifikasi

Rp11.169.000

Koreksi atas Reklasifikasi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi atas perpindahan suatu akun dari suatu pos ke pos yang lain dalam bagan akun standar agar sesuai dengan yang seharusnya. Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode

yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp11.169.000 dan Rp0. Saldo Koreksi atas Reklasifikasi ini berasal dari nilai penyusutan transaksional yang terbentuk dari transaksi Reklas Keluar Reklas Masuk di BDK Makassar.

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset
Rp0

Selisih Revaluasi Aset merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang Aset Tetap. Tidak terdapat Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

E.4.5 Koreksi Nilai Aset Non-Revaluasi

Koreksi Nilai Aset
Non-Revaluasi
(Rp90.950.406)

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah transaksi yang mengoreksi Aset namun bukan diakibatkan revaluasi nilai misalnya koreksi aset atas temuan auditor reklasifikasi antar-aset yang menyebabkan perubahan penyusutan karena perbedaan masa manfaat aset maupun penyebab koreksi nilai aset non-revaluasi lainnya. Koreksi Penilaian Aset Non Revaluasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp90.950.406) dan Rp1.480.514.377. Rincian transaksi Koreksi Nilai Aset Non-Revaluasi per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 66 Koreksi Nilai Aset Non-Revaluasi per 31 Desember 2023

No	Satuan Kerja	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	BPPK Pusat	3.289.424	Penyusutan transaksional yang terbentuk dari transaksi koreksi nilai berkurang BMN sehubungan dengan pembayaran dari CV Simpul Prima Gemilang atas kelebihan pembayaran pekerjaan lanjutan asrama Pusdiklat Keuangan Umum
		28.196.738	Penyusutan transaksional atas koreksi aset Gedung dan Bangunan
		20.984.188	Penyusutan transaksional atas Reklas Keluar dan Reklas Masuk dari Jaringan ke Peralatan dan Mesin
2	PKN STAN	21.330.000	Penyusutan transaksional yang berasal dari koreksi aset berupa RAM yang sebelumnya dicatat sebagai aset tersendiri kemudian dikapitalisasikan ke aset yang lain
3	BDK Malang	-	
4	BDK Makassar	-11.169.000	Penyusutan transaksional yang terbentuk dari aset yang di Transfer dari Sekretariat Badan sebesar 1 periode masa manfaat penyusutan
5	BDK Manado	28.319.056	Penyusutan transaksional yang terbentuk dari koreksi aset
	JUMLAH	90.950.406	

E.4.6 Lain-Lain

Lain-lain Rp0

Koreksi Lain-Lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara antara lain koreksi atas Pendapatan koreksi atas Beban koreksi atas Hibah koreksi atas Piutang dan koreksi atas Kewajiban. Tidak terdapat nilai Koreksi Lain-Lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

E.5 Transaksi Antar-Entitas

Transaksi Antar
Entitas
Rp397.931.103.061

Transaksi Antar-Entitas untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp397.931.103.061 dan Rp412.864.850.529. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L antar-K/L antar-BUN maupun K/L dengan BUN. Rincian transaksi antar-entitas per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 67 Transaksi Antar-Entitas per 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah (Rp)
Ditagihkan ke Entitas Lain	401.712.088.644
Diterima dari Entitas Lain	(4.685.350.873)
Transfer Keluar	(6.847.337.655)
Transfer Masuk	7.261.633.145
Pengesahan Hibah Langsung	490.069.800
Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung	-
JUMLAH	397.931.103.061

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

DDEL
Rp4.685.350.873
DKEL
Rp401.712.088.644

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar-entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode 31 Desember 2023 DDEL sebesar Rp4.685.350.873 sedangkan DKEL sebesar Rp401.712.088.644.

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk
Rp7.261.633.145
Transfer Keluar
Rp6.847.337.655

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal kementerian atau lembaga antar kementerian atau lembaga dan antara kementerian atau lembaga dengan BA-BUN. Transfer Masuk dan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp7.261.633.145 dan Rp6.847.337.655. Tidak terdapat Transfer

Masuk/Transfer Keluar aset yang terkait dengan penanganan COVID19. Adapun rincian Transfer Masuk dan Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

*Pengesahan Hibah
Langsung
Rp490.069.800*

*Pengembalian
Pengesahan Hibah
Langsung Rp0*

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung entitas dalam bentuk kas barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Terdapat Pengesahan Hibah Langsung senilai Rp490.069.800 dan tidak terdapat Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

E.6 Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir
Rp7.157.689.826.074*

Nilai ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp7.157.689.826.074 dan Rp7.177.140.299.363.



F. Catatan Penting Lainnya

F. CATATAN PENTING LAINNYA

Beberapa catatan penting lainnya merupakan informasi tambahan yang melengkapi penjelasan atas Laporan Keuangan Tahun 2023 *Audited* yaitu sebagai berikut:

1. seluruh satuan kerja di lingkungan BPPK telah melakukan rekonsiliasi eksternal dengan KPPN mitra menyelesaikan *To do List* MonSAKTI dan melakukan tutup periode permanen seluruh modul pelaporan Aplikasi SAKTI sehingga memperoleh Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) sesuai dengan PER-8/2023;
2. cetakan laporan yang digunakan untuk penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 *Audited* adalah cetakan yang berasal dari Aplikasi SAKTI dan rincian pendukung penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan yang berasal dari Aplikasi MonSAKTI;
3. jumlah satuan kerja lingkup BPPK mulai tahun 2023 menjadi 14 unit satuan kerja di mana pada tahun 2022 terdapat penggabungan satuan kerja dari Pusdiklat-Pusdiklat bergabung ke Sekretariat BPPK;
4. terdapat 5 temuan di BPPK 1 temuan diusulkan selesai sesuai dengan Pembahasan Tindak Lanjut Semester II 2023 sedangkan 4 temuan lainnya masih dalam proses penyelesaian;
5. angka pada Laporan Keuangan BPPK 2023 *Audited* sesuai dengan hasil pembahasan dan kesepakatan pada pertemuan tiga pihak (Tripartit) antara Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kementerian Keuangan BA015;
6. Badan Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2023 memiliki beberapa Proyek Unggulan (PU) dengan realisasi seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel Pagu/Target dan Realisasi Proyek Unggulan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Tahun 2023

No.	Kode RO	Uraian RO	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	Satuan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4683.DCF.301	Pembelajaran terkait Penguatan Budaya Kerja Kementerian Keuangan (PU)	661.735.000	616.229.782	93,12%	285.840	826.650	Orang	289,20%
2	4683.DCF.302	Pembelajaran Terintegrasi Pengendalian Intern pada Pelaporan Keuangan (PIPK) bagi Kementerian/Lembaga (PU)	280.275.000	272.507.390	97,23%	75.000	367.607	Orang	490,14%
3	4683.DCF.303	Training of Trainers Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PU)	11.475.715.000	10.645.555.514	92,77%	213.689	236.184	Orang	110,53%
4	4683.DCF.304	Pembelajaran Penindakan Narkotika (PU)	852.011.000	844.295.968	99,09%	13.230	13.161	Orang	99,48%
5	4683.DCF.305	Workshop on Vessel Search for Asia/Pacific Customs Officers (PU)	112.321.000	111.571.410	99,33%	810	1.888	Orang	233,09%
6	4683.DCF.306	Pembelajaran terkait Reformasi Tata Kelola Desentralisasi Fiskal dalam Undang-Undang HKPD (PU)	1.494.908.000	1.380.658.708	92,36%	62.620	97.647	Orang	155,94%
7	4683.DCF.307	Pengembangan UMKM Melalui Program Pembelajaran (PU)	352.409.000	352.091.314	99,91%	12.000	25.376	Orang	211,47%
8	4683.DCF.308	Pembelajaran Green Financing Policy Maker di Kemenkeu melalui Sertifikasi dan Dialog berbasis Riset (PU)	432.016.000	431.949.761	99,98%	1.740	2.930	Orang	168,39%
9	4684.DBA.301	Program Studi Diploma III dan IV Fast Track (PU)	729.488.000	727.760.301	99,76%	1	1	Orang	100,00%